

IzHarry Agusjaya Moenzir



# BUKAN TESTIMONI Susno



pustaka-indo.blogspot.com



**BUKAN**  
**TESTIMONI**  
**SUSNO**

[pustaka-indo.blogspot.com](http://pustaka-indo.blogspot.com)

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# TESTIMONI SUSNO

Sesuai Penuturan  
**KOMJEN POL DRS. SUSNO DUADJI, SH, MH, MSC**

Kepada  
**IZHARRY AGUSJAYA MOENZIR**



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



## **BUKAN TESTIMONI SUSNO**

Sesuai Penuturan

Komjen Pol Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc

Kepada IzHarry Agusjaya Moenzir

GM 207 01 10.0006

Copyright © 2010 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,

Kompas Gramedia Building Blok I Lt 4-5

Jl. Palmerah Barat 29-37

Jakarta 10270

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,

Anggota IKAPI, Jakarta, 2010

Penulis: IzHarry Agusjaya Moenzir

Penyelia: Indrawadi Tamin, Ph.D & Drs. Tarman Azzam

Pewawancara: Margianto

Penyunting: Nanang Junaedi

Foto Sampul: Mukhlis Hasyim - inilah.com

Desain Sampul: Imam Muharror

Tata Letak: Fitri Yuniar

Cetakan Pertama: Akhir Februari 2010

Cetakan Kedua: Awal Maret 2010

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-22-5509-6

---

Dicetak oleh Percetakan Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan



# Daftar Isi

PRAWACANA: <i>THE GENERAL U LOVE TO HATE</i>	vii
1. "Polisi Suka Minta Duit!"	1
2. <i>It's a Long Long Winding Road...</i>	9
3. "Jangan Pernah Setori Saya!"	17
4. "Kalau Setor-Setor, Saya Tak Mau!"	23
5. Jika Dapur Berasap, Tugas Pasti Selesai	27
6. Cecak Versus Buaya	35
7. "Ha! Suap Rp 10.000.000.000?"	41
8. <i>"Time Will Heal"</i>	47
9. Ke Singapore Bukan Liar	51

10. "Saya Tribrata-5! Bukan Truno-3!"	55
11. Kapolri Terlanjur Lapor	61
12. Kata Orang Wajah Saya Kayak Setan	65
13. Indonesia Tak Memberi Rasa Iba	73
14. Peristiwa Menggelinding Cepat	77
15. Puting-beliung Mabes Polri	83
16. "Kan Jabatan Saya Pati?"	89
17. "30 Juz di Atas Kepala Saya!"	93
18. "Read. Sudah R, Berarti Terbaca!"	97
19. Substansi atau Prosedur?	103
20. Angkat Suara, Bukan Melawan	109
21. Penyidik Sudah Mati	117
22. Penangkapan Robert Tantular	125
23. (Bukan) Testimoni	129
24. Testimoni yang Bikin Gerah	141
25. Harga Diri Saya Diinjak-Injak!	151
 PASCAWACANA : CERITA BELUM USAI	 155
TENTANG PENULIS	159





Prawacana:

## The General U Love to Hate

Saya membenci Susno Duadji!

*Itulah yang saya rasa tatkala melihat sosok Susno tampil di Komisi III DPR RI bersama jajaran Kepolisian. Terseret oleh arus besar public-opinion usai mendengar rekaman penyadapan di Mahkamah Konstitusi, saya menilai Komisaris Jenderal Polisi itulah dalang perekayasa. Sebagai anak Pamen Polri yang besar di lingkungan keluarga polisi, saya mau muntah melihatnya. Perut saya mual oleh tindak-tanduknya. Orangtua saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu.*

*Prawacana: The General U Love to Hate*

*Sejak itu saya selalu mencibir jika melihat gaya Susno berlakon. Di Facebook, berulang kali saya mencerca, mengolok-olok dan make fun of him.*

*Tapi pada Kamis 7 Januari 2010, kehadiran Susno di persidangan Antasari menghunjam saya. Ada getar di batin, dan saya tersentuh oleh kalimat-kalimatnya. Saya terpesona dibalut oleh gumpalan kata. Tampilan Susno membungkus saya untuk berpendapat bahwa pria gempal itu sedang berucap tentang kebenaran, tentang sesuatu yang tidak dikarang-karang, tentang pesan yang datang dari kalbu, suara nurani yang melantun tulus.*

*Mendadak saja saya ingin berbincang dengannya. Lewat akrab saya Margianto yang saban hari siaran di Radio Elshinta, saya menelepon Susno. Saya bilang, saya tidak suka padanya. Saya bilang saya mual. Tapi saya ingin bertemu karena takut salah persepsi. Saya ingin membersihkan batin. I don't know him since Adam, why should I hate him? Saya tak boleh menyimpan rasa tidak sehat ini. "Saya ingin mengenal Bapak," ujar saya kepada Susno.*

*Saya memang dalam proses ingin memutihkan nurani. Merasa bersalah ketika membiarkan diri tersedot oleh pendapat masyarakat dalam memberi predikat buruk bagi orang-orang seperti Susno. Padahal saya tidak mengenalnya secara pribadi. Dia tidak punya dosa ke saya. Bolehkah saya membenci tanpa dasar yang kuat?*

*Bersama Margi dan Indrawadi Tamin, pada Minggu 10 Januari 2010, kami bertamu ke rumah Susno. Mengapa tidak Senin di*

*hari kerja? "Jangan Senin," ujar Susno di balik telepon. "Mungkin Senin saya sudah ditangkap."*

*Saya tertawa atas joke yang nakal itu. Rasa benci saya mulai lumer. Saya ingin mendengar tuturannya dan ingin mengisahnkannya lagi kepada kawan-kawan. Tetapi apa sih manfaat menceritakan orang yang dianggap musuh oleh banyak orang? Sudah jelas Susno terlibat, kenapa harus dibela-bela? Lihatlah, mukanya saja kayak setan. Lirik-lirik kiri-kanan begitu adalah perilaku orang culas. Jangan percayalah sama orang kayak itu.*

*Namun ini bukan soal jenderal yang kita suka membencinya. Ini soal saya dan seluruh kita yang sering membenci sesuatu atau seseorang, tanpa tahu duduk masalah sebenarnya. Mari kita deteksi nurani masing-masing. Ketika jari telunjuk menuding, bukankah ada tiga jari lain yang menuding ke diri sendiri? Lagi pula, kalimat klise bilang, Everyone is innocent until proven guilty.*

*Karenanya, maukah kita berupaya mencari tonggak-tonggak ketulusan, agar nurani kita bisa bersih dalam menilai? Tidak inginkah kita bermandi kebenaran, agar tidak suuzan dan berburuk sangka terhadap siapa pun di sekeliling kita?*

*Saya pikir, kita harus membebaskan diri untuk bisa berpikir merdeka, bebas dari semua yang kita kenal, tak terpengaruh oleh arus pendapat orang lain. Yang banyak dan besar belum tentu mengandung kebenaran, sementara yang sedikit dan kecil belum berarti memiliki kesalahan.*

Kita harus hidup secara lengkap. Hidup yang sentosa adalah hidup dengan apa yang ada dan nyata, tanpa sedikitpun membenarkan dan menyalahkan, sehingga kita akan mengerti secara menyeluruh, dan karenanya persoalan-persoalan kita sendiri pun selesai. Jika kita mampu melihat jelas, maka dengan nurani putih, persoalan kita pun tuntas.

Saya tulis buku yang bersandar pada penuturan Susno ini bukan hanya bertujuan melihat siapa dirinya, tetapi juga untuk melihat siapa diri kita. Meskipun buku ini bercerita tentang Susno, ini lebih menyangkut ketulusan kita masing-masing. Nanti jika telah selesai membaca, kita boleh saja melontarkan tanya, apakah Susno Duadji berkata benar atau berbohong?

*Belantara Hujan, 10 Januari 2010*



*"Memberantas korupsi  
bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya,  
tetapi mulai dari pemimpin tertingginya."*

**SUSNO DUADJI**



**#1**

## **"Polisi Suka Minta Duit!"**

**S**usno Duadji terlahir sebagai anak kedua dari delapan saudara. Duadji, ayahnya, asli warga Pagar Alam, lahir, besar dan beranak-pinak di Sumatera Selatan. Mereka adalah keluarga yang bersahaja sejak leluhur, tanpa seorang pun pernah memiliki kedudukan tinggi. Inilah potret manusia-manusia sederhana dari keluarga kelas bawah, sosok-sosok yang tidak pernah dan tidak berani bermimpi tentang kemulukan. Mereka tidak hanya memicing mata agar tidak

terkesima pada kemewahan, tetapi juga melarang diri terhadap kelayakan.

Hidup keluarga ini sepenuhnya bersandar pada bentangan bidang-bidang tanah yang dijadikan lahan pertanian. Bekerja di ladang, menanam flora dan menernak fauna, mengolah tanah, menyemai biji dan menyiramnya agar bumi mencuatkan tanaman pemberi kehidupan. Sungguh sederhana siklus itu, mencari nafkah pagi untuk dimakan siang, bekerja di siang hari untuk santapan malam dan menyimpannya sedikit untuk sarapan pagi esok hari.

“Seluruh keluarga saya orang kecil. Tidak ada yang memiliki kekayaan dan jabatan tinggi. Saya jadi polisi cuma terbawa nasib saja,” kenang Susno.

Keluarga Duadji tidak membicarakan masa depan yang terlalu jauh. Pandangan cuma selintas hari, saat mentari mumbul di Timur dan tergelincir di ufuk Barat. Sekolah cuma sedapatnya saja. Jika telah bisa baca-tulis, itu cukup, sebab pendidikan yang tinggi terletak dalam jarak mimpi. Sekolah Menengah Atas adalah batas maksimal, tidak perlu berlanjut ke universitas. Uang tidak ada. Jangan berkhayal jadi sarjana. Tetapi jika berminat, silakan berupaya sendiri.

“Cari sekolah gratis,” anjur Pak Duadji yang dalam hidupnya senantiasa mengidolakan Presiden Sukarno sehingga menamakan anaknya dengan satu kata tunggal saja: Susno. Maka seperti Sukarno pula, Pak Duadji tidak membunuh

cita-cita, dan realitas kemiskinan tidak boleh memunahkan intelegensia. Sekolah gratis harus dicari.

Ucapan ayahnya itu terpancang kokoh di hati Susno, berubah bentuk menjadi tekad untuk mencari sekolah yang tidak perlu membayar. Karena itulah, setelah menyelesaikan SMA di Lahat, dengan menempuh jarak sekitar 280 kilometer, Susno menumpang-numpang kendaraan menuju Palembang, dengan harapan dapat masuk di Fakultas Pertanian. Warisan keahlian keluarga dalam bercocok tanam diharapkan bisa membebaskannya dari biaya. Apalagi Susno cuma bercita-cita ingin menjadi Penyuluh Pertanian. Sebuah cita-cita sederhana anak desa, karena pekerjaan itu akan memberi kesempatan baginya untuk bersepeda motor.

"Saya ingin naik motor," kata Susno yang terkagum-kagum pada kegagahan para Penyuluh Pertanian keluar-masuk desa.

Namun mimpi itu buyar dalam sekejap. Menurut peraturan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, setiap mahasiswa harus membayar. Tidak ada yang gratis. Tidak ada beasiswa. Susno musti mengeluarkan uang, membayar, sesuatu hal yang musykil baginya. Maka tanpa ada jalan lain, Susno pun surut. Apa boleh buat, mimpi akan kegagahan pengendara sepeda motor pun punah.

Luluh dalam rasa kecewa, seorang sanak memberi informasi tentang sekolah yang tidak perlu bayar.



"Pendaftaran untuk jadi polisi sedang dibuka," ujar sanak-nya. Dan Susno langsung membersihkan pertanyaan pertamanya.

"Bayar?"

Saudaranya menggeleng panjang. Akabri Kepolisian yang sedang memasuki tahun ajaran baru membuka peluang bagi yang berbadan kuat dan berjiwa sehat. Tidak perlu keluar uang. Gratis.

Setelah yakin tidak akan ada bayar-bayaran, Susno pun mendaftar. Segala macam tes diikutinya dan semua bisa dilalui dengan baik. Tubuhnya yang terbiasa dengan kerja keras, ditambah ketajaman berpikir, membuat Susno sampai ke tahap wawancara, dan diberangkatkan ke Sukabumi. Meski diliputi keraguan, dia terus maju, tidak mundur oleh kekhawatiran.

Susno masih ingat, ketika di Sukabumi ada tiga polisi yang mewawancari. Salah seorang yang duduk di tengah, sepertinya berpangkat Kolonel, melemparkan tanya.

"Apa alasanmu masuk Akabri Kepolisian?"

"Karena sekolah ini tidak bayar, Pak!" tegas Susno jujur.

"Apa pandanganmu tentang polisi?"

"Saya tidak suka sama Polisi, Pak."

Hening sejenak, tapi Kolonel Polisi itu menyambar.

"Kenapa tidak suka sama Polisi?"

"Polisi suka minta duit, Pak!" jawab Susno tanpa pertimbangan.

Dengan sudut matanya yang tajam, Susno melihat rona merah di wajah para polisi itu, membuat dirinya membutuhkan sesal. Sebab bisa saja wawancara dihentikan dan dia langsung ditolak, tak bisa bersekolah. Kedua polisi itu kelihatannya juga sudah siap mengumbar amarah. Kecuali sang Kolonel. Sambil menyikut kedua temannya dia menyela.

"Lho, kok Anda bilang begitu? Punya bukti?"

"Punya, Pak," jawab Susno.

"Apa buktinya?"

"Ayah dan *Mamang* (paman) saya, Pak. Mereka kenek dan supir, sering dimintai duit sama Polisi."

Seiring kalimat itu meluncur, Susno pun pasrah. Tidak akan ada sekolah. Bertani sajalah. Jantung Susno dag-dig-dug, karena saringan terakhir untuk diterima sebagai Taruna Polisi ditentukan di Sekolah Polisi di kota itu. Jika bisa lulus di sana, baru akan ditransfer ke Magelang. Tapi jika tidak lulus, bagaimana nasibnya?

“Saya dihantui bayang-bayang kegagalan. Kalau tidak lulus, terkaparlah saya. Terpaksa balik kampung ke Lahat, padahal di kantong sudah tidak ada duit lagi,” kenang Susno. “Saya sudah hitung, jika jual sepatu dan celana, uangnya tetap tidak bisa dijadikan ongkos pulang.”

Susno membutuhkan kepastian.

“Kalau tidak lulus, kami sediakan ongkos pulang,” jawab instrukturnya.

Hati Susno lega!

Tapi akhirnya Susno tidak pernah mendapat ongkos pulang itu. Polisi tidak memberinya. Ya, karena dia berhasil lulus dari Sukabumi dan sangat layak berlanjut menuju Magelang, menyongsong gojlok candradimuka.

“Allah memang Maha Besar. Alhamdulillah, saya lulus,” batin Susno, meski tidak mengerti mengapa bisa lulus seleksi. Hasil ujiannya bagus, kesehatannya prima, namun kegamblangannya bisa membahayakan diri. Keterusterangan memang tidak selalu baik. Harus ada tata cara dalam berbicara, harus pandai berkomunikasi. Dia harus belajar *the way of saying things*.

Dalam renungan, Susno menduga tiga kemungkinan yang membuatnya diterima menjadi taruna Polisi. Pertama, Panitia Seleksi mengasihani dirinya. Kedua, karena dia lahir tanggal 1 Juli yang juga merupakan hari Bhayangkara. “Yang ketiga

karena polisi pewawancara itu menghargai keterusterangan saya," katanya.

Apa pun alasannya, kelulusan Susno pastilah tidak terlepas dari pengaruh *open-minded* sang Kolonel. "Saya sangat terkesan padanya. Untung ada dia," ujar Susno. "Dialah polisi berjiwa reformis pertama yang saya kenal. Saya ingin seperti dia."





**#2**

## ***It's a Long Long Winding Road...***

**P**ada masa itu, persisnya di tahun 1974, Akabri menyatukan seluruh calon taruna tahun pertama dari berbagai angkatan dan Kepolisian di Magelang. Di kota sejuk itu, mereka akan menerima pendidikan awal. Nanti di tahun kedua baru akan dibagi dan digembleng di jurusan masing-masing.

Susno mengikuti semua pelajaran dengan tekun. Setahun di Magelang membuat dia tumbuh sebagai anak rantau yang kokoh, sama sekali tanpa bantuan orang tua. Tidak ada hubungan surat menyurat dan hubungan telepon, bahkan tak ada kerinduan, karena perasaan cengeng yang melemahkan tekad harus dibunuh.

Setelah melewati tahun pertama penuh gembleran, Susno diberi hak untuk menuju Sukabumi lagi, masuk ke Akademi Polisi (Akpól). Dia sama sekali tidak memberitahu ayah dan seluruh keluarganya. Tanpa kabar, tanpa rindu. Bagi keluarga Duadji, tidak ada kabar berarti semua baik-baik saja. *"No news is a good news,"* kata Susno.

Dua minggu mengenyam pendidikan di Sukabumi, Susno menerima surat dari ayahnya. Pak Duadji mengetahui keberadaan Susno setelah menerima pemberitahuan resmi dari Akpól. Hatinya haru. Rindu berkecamuk. Ibu tentu sudah renta. Susno ingin memeluknya. Namun tidak hari ini. Susno masih harus menepati janji diri, tidak akan pulang sebelum tamat belajar. Hanya bersujud sajalah yang mengobati jiwanya, memanjatkan doa untuk kesehatan semua keluarga. *"Saya berserah. Selalu berpasrah. Tiada peristiwa apa pun yang bisa berlaku tanpa izin-Nya."*

Di Sukabumi, Susno menempa diri mati-matian. Hampir tidak ada waktu buat leha-leha. Hidup adalah otot dan otak. Taat tugas dan patuh jadwal. Inilah masa-masa ketat yang

sangat tertata. Semua musti dijalani hingga Susno akhirnya ditabalkan menjadi Perwira Muda Polri.

Setapak demi setapak, Susno beringsut-ingsut mengukir karir. Bukan hal mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit, terutama bila semua mengikuti ketentuan dan aturan. Niat dan tekad harus terus kobar, selalu tampil tegas dan tak takut bersikap. Berani bersuara lantang pada apa yang bathil. Ke-taatan azas dan rasa takut kepada Allah membuat Susno memiliki keyakinan kuat. Dia tidak takut beda, berani tidak populer dan selalu vokal dalam mengemukakan pendapat.

Sikap hidup inilah yang kemudian membawa Susno mene-lusuri alur panjang karirnya. Sikap berani angkat suara mem-buat teman-teman sependidikan melihatnya sebagai sosok yang kontroversial. Susno menyadari hal itu, tapi terserahlah. Susno tak terlalu ambil pusing, karena ini memang sudah hakikat diri dan kebiasaan di kampung. Di Pagar Alam semua orang bicara blak-blakan dan terbuka. Satu kata dengan per-buatan. Tidak berbelit-belit, apalagi mencla-mencle.

Susno tutup mata dan terus melaju dengan berbagai pen-didikan dan berbagai jabatan, sekaligus membina diri dengan berbagai penugasan.

Di bidang pendidikan, dari Akpol Semarang, Susno berlanjut ke:

1. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta, tahun



1986

2. Fakultas Hukum Ubara di Surabaya, tahun 1998
3. S2 Manajemen di Surabaya, tahun 1999
4. Sesko AD di Bandung, tahun 1995
5. Sespati Polri di Lembang, tahun 2003
6. Lemhanas KSA XIV di Jakarta, tahun 2006
7. S2 Hukum di Jakarta, tahun 2008

Dalam bidang pekerjaan, jabatan yang pernah dipegang Susno adalah:

1. Kasatserse Polres Wonogiri, tahun 1979
2. Kapolsekta Banjarsari Solo, tahun 1984
3. Kabagserse Polwil Banyumas, tahun 1988
4. Wakil Kapolresta Yogyakarta, tahun 1991
5. Kapolres Maluku Utara, tahun 1995
6. Kapolres Ambon & Pulau-pulau Lease, tahun 1997
7. Kapolres Madiun, tahun 1998
8. Kapolres Malang, tahun 1999

9. Wakil Kapoltabes Surabaya, tahun 2000
10. Kabidrapkum Divbinkum Polri, tahun 2002
11. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tahun 2004
12. Kapolda Jawa Barat, tahun 2007 – 2008
13. Kabareskrim Polri, Oktober 2008 – November 2009
14. Pati Mabes Polri, 30 November 2009 – sekarang

Adapun beberapa kursus dan penugasan yang diikutinya adalah:

1. *Hostage Negotiation Course & Anti Terror Program* di Succorro, New Mexico, AS, 2000
2. *Training Report & Analisis Suspicious Transaction Report (STR)* di Den Hage, Nederland, tahun 2004
3. *Training Law Enforcement for Money Laundering Case* di Brussel, Belgia, tahun 2004
4. *Training Financial Information Exchange & International Network* di Madrid, Spanyol, tahun 2004
5. *Comparative Study for Crime Justice System* di Kuala Lumpur, Malaysia, 2001

6. *Senior Official Meeting for Transnational Crime (SOMTC)* di Brunei Darussalam, 2003
7. *Comparative Study for Police System* di Seoul, Korea Selatan, 2003
8. *Comparative Study for Money Laundering* di Washington DC AS, 2003
9. *Comparative Study for Money Laundering* di Switzerland, 2004
10. *Visiting Study for Financial Intelligence Unit* di Warsawa Polandia, 2004
11. *Comparative Study for Arbitration Alternative Dispute Resolution* di New York, AS, 2004
12. *Senior Official Meeting for Transnational Crime (SOMTC)* 4<sup>th</sup> di Brunei Darussalam, 2004
13. *Senior Official Meeting for Transnational Crime (SOMTC)* 5<sup>th</sup> di Siem Reap, Kamboja, 2005
14. *Trans Organize Crime (TOC) Conference* di Bangkok, 2005
15. *Comparative Study for Anti Money Laundering Law* di Pilipina, 2005
16. *National Resilience Comparative Study* di Germany, Austria, Mei 2006

17. *International Criminal Police Organization (ICPO) 75 di Rio de Janeiro, Oktober 2006*
18. *Drafting and Sign MoU & Comparative Study for Money Laundering and Financial Intelligence Unit di Pretoria, Afrika Selatan, November 2006*
19. *Drafting and Sign MoU & Comparative Study for Money Laundering and Crime Justice System di Tokyo, Jepang, Desember 2006*
20. *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering and Monival Conference di Strasbourg, Perancis, Februari 2007*
21. *Senior Official Meeting for Transnational Crime (SOMTC) 7<sup>th</sup> di Vientiane, Laos, Juni 2007*
22. *Drafting and Sign MoU & Comparative Study for Money Laundering and Crime Justice System di Ankara, Turki, Agustus 2007*
23. *Drafting and Sign MoU & Comparative Study for Money Laundering di Helsinki, Finlandia, September 2007*

Selain semua itu, Susno Duadji juga ikut dalam penyusunan beberapa Undang-Undang, antara lain:

1. Undang-Undang Anti Korupsi

2. Undang-Undang Pencucian Uang
3. Undang-Undang KUHAP
4. Undang-Undang Terorisme
5. Undang-Undang Rekonsiliasi Nasional
6. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Undang-Undang TNI dan lain-lain

Susno juga menulis buku, yaitu:

1. Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal, terbit Juli 2008
2. Perjalanan KUHAP Seperempat Abad Lebih: Masalah Substansi dan Implementasi, terbit April 2009

Bekal pengalaman itulah yang kemudian membawa Susno melangkah pasti menjadi Kapolda Jawa Barat, meski tak semua jalan bebas onak duri dan tak semua langkah menapak mulus. *It's a long long winding road.....*



**#3**

## **"Jangan Pernah Setori Saya!"**

**K**umpulan ilmu, jabatan, penugasan dan gejolak hidup yang tidak mudah kemudian mengantarkan Susno menjadi Kapolda Jawa Barat. Terhitung sejak 23 Januari 2008, Susno resmi menggantikan Irjen Pol Soenarko Danu Ardanto, dengan bersandar kepada Keputusan Kapolri Jenderal Sutanto dengan no. Pol: Kep/11/I/2008.

“Saya mempunyai trik khusus untuk pengamanan Jawa Barat, tapi jangan tanya sekarang,” ujar Susno se usai acarapisah-sambut di Mapolda Jabar. “Beri saya waktu beberapa hari, baru nanti saya akan bicara.”

Memang, cuma lima hari setelah menjabat, Susno langsung menggebrak. Dia kumpulkan seluruh perwira Satuan Lalu Lintas, mulai dari tingkat Polres hingga tingkat Polda. Meski bicara dengan gaya santai dan mengambil waktu 10 menit, namun kalimat-kalimat Susno menyentak seluruh jajaran.

“Jangan pernah setori saya!” hentak Susno.

Menurut Susno, perilaku memeras atau menerima setoran itu adalah perilaku zaman jahiliah. Tidak perlu lagi ada anggota yang menyettor ke Kasatlantas atau ke Kasatserse, lalu Kasatlantas dan Kasatserse menyettor ke Kapolres, Kapolres menyettor ke Kapolwil yang nanti akan menyettor untuk melayani Kapolda.

“Jangan pernah setori saya! Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem setoran!” tegasnya.

Ruangan mendadak dingin dan sepi. Ucapan Kapolda yang baru bertugas lima hari ini kelihatannya bukan sekadar gertak. Dengan gaya khas yang suka lirak-lirik, Susno menebar sorot mata menghunjam.

“Tidak perlu ada lagi setoran-setoran! Tidak perlu ingin kaya! Dari gaji sudah cukup! Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi,

tetapi pengusaha. Ingat! Kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani! Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya saya main copot-copotan jabatan!”

Perintah itu tak hanya menggema di ruang rapat Mapolda Jabar, tetapi juga bergaung ke seluruh penjuru, khususnya provinsi Jawa Barat. Isinya jelas, yaitu tidak ada lagi pungli (pungutan liar) di Satlantas, baik di lapangan dengan tilang (bukti pelanggaran), maupun di kantor dalam pelayanan SIM, STNK, BPKB dan lain-lain.

Susno jelas tidak sedang bercanda. Dan tidak akan pernah bercanda jika itu menyangkut masalah kedinasan. Pengalaman kerja di PPAK sebagai lembaga yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Susno menjadi sangat *firm* dan teguh. Itukah yang membuat dia terus menabuh genderang perang terhadap pungli?

“Tidak cuma pungli!” kata Susno. “Kalau pungli, terkesan ketercelaan perbuatan itu kecil. Yang kita perangi itu korupsi. Pungli adalah korupsi. Korupsi itu salah! Apalagi jika aparat hukum yang korup. Bagaimana kita sebagai aparat hukum bisa memberantas korupsi kalau kita sendiri korupsi?”

Di tahap awal instruksinya, Susno berniat lebih dulu membersihkan ‘dalam’ tubuh Polri. “Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur dan lain-lain kalau di ‘dalam’ belum bersih dari korupsi? Kalau aparat korupsi, tamatlah republik ini,” katanya lagi. Polisi harus membuka diri untuk diperiksa,



karena menurutnya, upaya pemberantasan korupsi bukan harus dimulai dari tingkat bawah, melainkan dari pimpinan tertinggi.

“Periksa saya dan keluarga saya. Sesudah itu baru periksa pejabat-pejabat di Polda. Baru kemudian turun ke Kapolwil, Kapolres dan seterusnya,” tambahnya. “Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya, tetapi mulai dari pemimpin tertinggi.”

Susno menjelaskan, Polri tidak perlu takut jatuh merek jika menangkap Kolonel Polisi atau polisi berbintang berapa saja. Tak perlu ada rasa takut, karena rakyat pasti akan senang jika Polisi bebas dari korupsi. Polisi itu milik rakyat. “Apa yang ditakutkan? Saya justru merasa lebih tidak terhormat jika berada di dalam kesatuan yang penuh korupsi,” tegasnya.

Bagi Susno, mengusut kasus korupsi sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap pencurian jemuran memerlukan polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, seperti orang iseng, orang yang sedang lewat dan orang-orang lain. Mengusut kasus korupsi tidak butuh polisi yang terlalu pintar, karena cuma tinggal mengikuti aliran dananya saja. *Just follow the money*, pasti ketemu.

“Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya?” tutur Susno. “Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya cuma satu, kemauan yang kuat.”

Di sisi lain, Susno memang mengakui pemberantasan korupsi agak lambat karena biasanya berhadapan dengan orang-orang yang memegang jabatan. Orang-orang berjabatan itu gampang tergoda melakukan korupsi. Tinggal batuk, uang datang. "Jadi masalahnya ada pada diri sendiri. Tepuklah dada, tanyalah selera, apakah mau terjerumus di dalam kenikmatan korupsi yang sesaat, atau mau bekerja dengan bersih?"

Susno juga mengajak jajaran Polri untuk belajar sepanjang masa. Dan Susno sudah melakukannya dengan menulis buku berjudul *Selayang Pandang: Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal* terbitan Juli 2008, yang merupakan refleksi pemikirannya sewaktu menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK. Dia berharap polisi punya waktu luang untuk membaca. Polisi harus membangun jiwa dan memperdalam ilmu, jangan cuma bangga karena mampu membangun kantor yang megah.

"Jangan lagi ada Kapolsek, Kapolres dan Kapolwil yang bangga karena mampu membangun kantor dengan megah. Dari mana duitnya, kalau bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap seperti pengusaha judi dan pelaku penyeludupan?" sinyalir Susno.

Untuk semua itu, Susno berkeyakinan tidak akan ada pro-kontra di kalangan Polri. Peraturan sudah jelas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dengan ancaman pemecatan. Tidak perlu diper-

debatkan. Titik. Setiap pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan. Polisi harus punya malu.

“Malu dong, polisi pakai bintang, jalan petantang-petenteng, tetapi jajarannya korupsi dan memberi pelayanan yang tidak sesuai standar. Malu dong, polisi pakai bintang lewat bermobil seenaknya pakai *nguing-nguing* (sirene), sementara rakyat mengalami macet. Itu juga korupsi.”

Bagi Susno, polisi yang korup sama dengan pelacur. Jadi kalau dia korup, dia sama saja dengan pelacur.



**#4**

## **“Kalau Setor-Setor, Saya Tak Mau!”**

**D**ari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat, Susno kemudian dipromosi menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) di Mabes Polri. Jabatan yang sangat bergengsi di jajaran Polri itu mulai dijabatnya sejak 16 Oktober 2008. “Saya tidak pernah memimpikan jabatan itu,” ujar Susno. Menjadi Kapolda saja baginya sudah

luar biasa. "Saya merasa terhambung, apalagi jabatan ini merupakan keputusan Presiden."

Susno berkisah, sewaktu akan diangkat menjadi Kabareskrim, Kapolri Bambang Hendarso Danuri berkata kepadanya.

"Saya akan angkat Pak Susno menjadi Kabareskrim."

"Siap, Pak!" jawab Susno.

Kapolri berpesan agar Susno menjaga reformasi di tubuh Polri dan menjamin pelayanan Polri menjadi lebih bagus. Susno menyatakan kesiapan. Tapi dengan lantang pula dia menyela.

"Saya siap, Pak! Tapi kalau setor-setor saya tidak mau!" tegasnya.

Meski agak tersentak, Kapolri dengan bijak menanggapi. "Ya, tidak apa-apa. Kita Polri harus berubah!"

Jawaban Kapolri itu sungguh melegakan Susno sekaligus kagum. Ini membuktikan bahwa Bambang Hendarso adalah orang yang terbuka dan reformis. Dalam hati dia berharap agar pria yang memiliki senyum cerah itu berhasil menjadi Kapolri yang mencatatkan tinta emas, di samping tiga Kapolri lain yang dikaguminya.

Polri pernah memiliki Hugeng Imam Santoso sebagai Kapolri era 1968-1971, pemimpin yang meletakkan dasar-dasar pro-

fesionalisme Polri. "Pak Hugeng berhasil mencitrakan Polri sebagai institusi yang bersih dan benar-benar menjadi pelayan masyarakat," ujarnya.

Selain Hugeng, Kapolri lain yang dikagumi Susno adalah Dr. Awaloedin Djamin, Kapolri periode 1978-1982. "Saya mengagumi Beliau," kata Susno. "Karena pada masa yang tidak mudah di era Orde Baru, Awaludin berhasil meletakkan dasar-dasar pengembangan dan penataan Polri."

Sementara di masa reformasi ini, Kapolri yang menjadi panutan dan ingin ditirunya adalah Jenderal Polisi Sutanto yang menjabat pada 2005 hingga 2008. "Gayanya khas, kalem, tapi dia bertindak jelas, tegas dan sederhana," jabarnya. Susno mengenang tindakan Sutanto ketika mengumpulkan seluruh pejabat Polri untuk menerima dua instruksi yang sangat jelas: Tidak boleh ada lagi judi di Indonesia! Dan: Polri tidak boleh terlibat dalam kasus-kasus perdata!

Menurut Susno, jika ingin berubah, Polri harus memiliki pimpinan yang memiliki inisiatif melakukan perubahan. Kalau ingin melakukan reformasi, Polri perlu memilih pucuk pimpinan yang reformis.

"Polisi memerlukan orang-orang seperti Kolonel yang dulu mewawancarai saya waktu masuk polisi," kenang Susno lagi. "Seorang perwira Polri jangan mudah marah dan harus bisa menerima kritik. Kalau polisi memang ingin berubah, karakter seperti inilah yang dibutuhkan."

Sesuai aturan, Susno kemudian diajak Kapolri ke Istana Negara untuk menghadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di sana, Presiden menegaskan pengangkatan Susno sebagai Kabareskrim. Hati Susno membuncah. Selain karena tugas baru itu sangat menantang, juga karena dia yakin akan semakin mantap menjalankan tugas.

“Maklum saja, saya kan diangkat oleh dua Bambang!” katanya senyum.



**#5**

## **Dapur Berasap, Tugas pun Selesai**

Pengharapan Susno terhadap Bambang Hendarso Danuri semakin hari semakin berlipat ganda. Pada diri Kapolri ini, Susno melihat ada perwujudan polisi reformis, sesuatu yang merupakan mimpi Susno sejak lama. Menurut Susno, Bambang Hendarso mewakili citra kepolisian yang bersih, taat azas, tidak nakal, bertanggung jawab dan mempunyai



visi luas serta misi yang jelas. Kalimat 'Kita Polri harus berubah!' yang meluncur dari mulut Kapolri, terus menerus terngiang di liang pendengarannya, menyalakan kobaran di hati Susno.

"Saya ingin menempatkan Pak Bambang sebagai Kapolri keempat yang paling saya kagumi," ujar Susno polos.

Dia pun menumpahkan kesegalaannya untuk tugas. Seperti seorang manajer yang baru memulai tugas, atau bagai nahkoda di sebuah kapal yang sedang kelebihan beban, Susno menata rencana kerja yang matang. Dia yakin, kerja keras bisa merampungkan cita-citanya untuk membuat Polisi menjadi lebih baik di mata masyarakat. "Pengabdian polisi harus total!" katanya. "Tidak perlu waktu yang lama dan proses berbelit-belit. Mulai hari ini kerja nyata harus memberi hasil."

Susno pun menyusun butir-butir prioritas, yaitu:

1. ***Menangkap Gembong Teroris, membongkar dan menghancurkan jaringan teroris.*** Upaya ini berhasil dengan baik. Berkat ketekunan dan pengabdian tak kenal lelah Densus 88/AT Bareksrim Polri, kasus bom Hotel J.W. Marriott dan Ritz Carlton dapat diungkap. Para pelakunya dibekuk dalam tempo kurang dari satu bulan. Operasi penghancuran jaringan teroris menemukan titik puncak ketika Noordin M. Top berhasil dilumpuhkan. Teroris yang paling dicari itu tewas diterpa peluru polisi. Tindak lanjutnya, Polisi juga berhasil menangkap segerombolan

teroris yang sudah menyusun rencana untuk meledakkan iring-iringan mobil Presiden Republik Indonesia.

2. ***Membasmi premanisme.*** Tugas ini berhasil baik dengan keberhasilan menggulung ribuan preman serta menyita berbagai jenis senjata api dan senjata tajam.
3. ***Menuntaskan Pelanggaran Hukum Pemilu Legislatif 2009 dengan aman.*** Tujuan tercapai, tuntas 100 persen dan aman.
4. ***Menyelesaikan Pelanggaran Hukum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.*** Tujuan tercapai, tuntas 100 persen dan aman.
5. ***Menyelesaikan Kasus Bank Century dan Asset Recovery minimal 25 persen.*** Tujuan tercapai, bahkan *asset recovery* melampaui prestasi, bisa mencapai 200 persen. Hal ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah pengungkapan kasus perbankan dengan aset yang tergolong sangat besar.
6. ***Menindak Illegal Logging, Illegal Fishing dan Illegal Mining.*** Tujuan tercapai, meningkat 20 persen.
7. ***Menindak Kasus Korupsi.*** Tujuan tercapai, meningkat 10 persen.
8. ***Membongkar, menangkap jaringan dan pelaku kejahatan narkoba internasional serta memberantas pabrik narkoba.*** Tujuan tercapai dan sangat sukses.

9. **Menyelesaikan kasus kejahatan konvensional.** Tujuan tercapai, meningkat 10 persen.
10. **Menghilangkan keluhan masyarakat.** Tujuan tercapai, keluhan masyarakat turun 20 persen.
11. **Menggalang transparansi penyidikan penggunaan IT untuk menghubungkan Bareskrim dengan seluruh Polda, Polwil, Poltabes, Polres, Polresta.** Tujuan tercapai 90 persen.
12. **Menggagalkan tuntutan negara-negara Eropa.** Tujuan tercapai. Anjungsana Susno ke Belanda tahun 1979 berhasil menggagalkan tuntutan negara-negara Eropa kepada Pemerintah RI senilai Rp. 7.000.000.000.000,- terkait dengan bangkrut dan jatuhnya Bank Indover.

Menyusun program seperti itu memang sangat mudah, namun mewujudkan bisa pusing tujuh keliling. Belum tentu semua dapat dicapai. Dari 12 butir rancangan kerja yang disusun Susno, pun tidak seluruhnya rampung sempurna. Sebab kendala selalu ada, bukan cuma halangan eksternal, tetapi juga dari kondisi internal. Padahal Susno tidak menafikan bahwa Polri adalah badan profesional yang terlatih. Teruji. Cekatan. Tanggap. Tangguh. Tanggon. Trengginas. Berani dan punya kemampuan tinggi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya.

Namun itu semua harus disokong oleh dukungan finansial keluarga yang baik. “Bagaimana petugas bisa menjalankan tugas dengan sempurna, jika kebutuhan dasar mereka sebagai manusia belum terpenuhi?” sinyalir Susno. Menurut Susno, petugas yang masih harus berpikir tentang periuk nasi kosong pasti tidak akan bisa menembak dengan tepat. Bintara yang belum membayar uang sekolah anaknya pasti-lah akan megap-megap berhadapan dengan para pelanggar hukum.

“Jadi, kebutuhan dasar itu mutlak!” seru Susno. Negara harus menyediakan anggaran yang tinggi bagi para anggota korps Kepolisian. “Jangan cuma jenderal-jenderal saja yang kaya!” Sebab kesenjangan gaji bisa menimbulkan kecemburuan dan perpecahan. “Kalau mengikut keinginan saya, gaji polisi itu harus lebih tinggi dari gaji tentara, sebab polisi itu bekerja 24 jam, *around the clock*. Tak pernah berhenti.” Susno melihat, tugas kerja polisi itu tidak terbatas hanya delapan jam. Bahkan ketika seorang polisi sudah pulang kerja dan berada di rumah pun, polisi tetap seorang polisi bagi warga lingkungan. Setiap polisi harus selalu siap menghadapi berbagai kondisi.

Cuma Susno mengerti, anggaran negara memang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan itu. Makanya dia merasa tidak perlu melarang polisi mengerjakan hal-hal lain di luar jam kerja, asal pekerjaan itu halal, tidak mengganggu tugas, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berkenaan

dengan keberadaan sebagai polisi. “Polisi itu kan manusia juga. Dia harus menutup kebutuhan ekonominya,” tegas Susno. “Harus hidup layak agar tidak korup saat bertugas.”

Menyadari hal itulah Susno selalu menjaga usaha keluarga yang dirintis sanak familinya. Keluarga Duadji memang sudah bergenerasi mengelola usaha pertanian mereka. Meski cuma untung kecil dan bernilai seperak dua perak, tetapi usaha dagang itu jalan. Hasil bumi dari lahan di dusun dijual ke kampung-kampung lain, diboyong ke kota dan labanya digulung atau dinikmati bersama. Dan selaras dengan perjalanan waktu, bisnis kecil-kecilan itu semakin hari semakin tumbuh menjadi besar dengan daya jangkau pasar yang luas. “Kini kami bangga bisa menyebutnya sebagai *trading*,” canda Susno. “Keren kan? *Trading* lho!”

Bersama dengan saudara-saudara sekampung, kini usaha keluarga itu bergerak di bidang perdagangan hasil bumi seperti kopi, karet dan cengkeh, juga hasil tambang seperti batubara, pasir, dan galena. Menurut Susno, usaha ini sah dan legal, surat-surat lengkap, segala bentuk pajak dibayar. “Pajak dunia bayar, pajak akhirat 2,5 persen pun bayar,” katanya. “Kadangkadang lucu juga, karena sekali-sekali pungli (pungutan liar) pun kita bayar. Saya sih bisa bereskan masalah itu, tapi kalau saya muncul, berarti saya sudah mencampurkan bisnis dengan kedinasan saya.”

Bisnis *trading* memang sepenuhnya dijalankan oleh keluarga dan teman-teman sekampung yang menyemplungkan diri

di bidang bisnis. Yang punya jabatan tidak boleh menjadi pelaksana. "Saya tidak boleh, abang sepupu saya yang bekerja di kantor pajak juga tidak boleh ikut. Kami hanya ikut rapat, memantau dari jauh, menjaga agar tetap di jalur resmi nan halal dan memberikan sumbangan pikiran," ujar Susno.

"Hidup sebagai polisi itu susah!" tandas Susno. "Jangankan bintang, gaji jenderal bintang tiga seperti saya saja tidak cukup." Susno menyontohkan gajinya yang cuma 11,5 juta, termasuk tunjangan. Anak-anak harus sekolah, makanan harus baik, pakaian harus rapi, dan lingkup pergaulan menuntut agar tampil bergengsi.

"Padahal saya ini sudah bangkrut sebenarnya!" (Ini adalah ucapannya di hari ketika Susno kemudian dicopot dari jabatan Kabareskrim untuk diposisikan sebagai Perwira Tinggi di Mabes Polri. Gajinya dipotong 60 persen, sehingga cuma menjadi 4,6 juta. Tunjangan dihilangkan dan segala fasilitas ditarik.)

Jadi, menurut Susno, hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Harus ada perubahan dan peningkatan. "Manalah mungkin menuntut dedikasi tinggi dan memelihara kejujuran polisi-polisi yang dapurnya tak berasap! Mustahil itu!"

Janganlah terkejut jika masyarakat tidak percaya pada kemewahan polisi. Sudah rahasia umum, kekayaan anggota Kepolisian selalu dibisik-bisikkan di belakang punggung,

dibicarakan dengan sembunyi-sembunyi. Jika seorang polisi terlihat berada, publik pasti menilai ada yang tidak beres. Susah memperbaiki tanggapan masyarakat, sama susahanya untuk menjawab keluhan masyarakat. Susno baru bisa menurunkan tingkat ketidakpuasan ini sekitar 20 persen.

Makanya, ketika Susno terbelit tuduhan dan dugaan menerima suap 10 milyar, masyarakat langsung menghujatnya habis-habisan, bahkan hal-hal sepele seperti perumpamaan seperti Cecak dan Buaya pun menjadi isu nasional. Dahsyat!



**#6**

## **Cecak Versus Buaya**

**C**icak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cicak harus ditulis sebagai cecak, bukan cicak. Diartikan sebagai 'binatang merayap, biasa hidup di rumah (pada langit-langit, di dekat lampu), makanannya binatang-binatang kecil (seperti nyamuk, laron), sering berbunyi "cek, cek" dan dalam istilah Latin dinamakan *Hemidactylus frenatus*.



Di Encyclopedia Encarta, binatang ini diterangkan sebagai *small house lizard*. Jenisnya sangat banyak. *Gecko, common name for members of a family of small, harmless lizards, found mainly in tropical regions. Certain species of this family make a loud clicking noise that sounds like "gecko"; they are the only lizards that make any sound other than hissing. Geckos are often seen at night running upside down on the ceilings of houses. Geckos vary in body length from 1.5 to 25 cm and often have broad, flattened heads and thick, stumpy tails. The skin is often coated with tiny, beadlike scales. In most species the two eyes are each covered by a transparent membrane kept clean by the tongue, which is thick and sticky. Most geckos feed at night on insects and are attracted to common household pests.*

Jalan-jalanlah ke Hawaii. Gecko ini sangat populer karena dijadikan merk busana, biasanya berupa kaus oblong yang dikenakan sebagai pakaian *casual* sehari-hari. Di Bali juga banyak. Dan orang bangga memakainya.

Tetapi di Indonesia, terminologi 'cecak' mendapat konotasi yang kerdil. Dalam menginterpretasikan ucapan Susno tentang eksistensi 'Cecak dan Buaya', publik menganggap bahwa KPK dinilai Susno sebagai institusi yang kerdil jika dibandingkan dengan institusi Polri yang besar dan dilambangkan sebagai 'buaya'.

Celakanya, istilah itu terus merayap, melebar dan memasyarakat dengan pengertian negatif. Di mana-mana orang

mengutip, memakai dan mengartikannya dengan penilaian yang tidak pantas. *Public-opinion* yang meluas tanpa kendali itu menjadikan arti dan maknanya berbeda dengan yang disampaikan Susno.

Maksud Susno sebenarnya tidak sedahsyat itu. Menurutnya, istilah Cecak-Buaya itu berasal dari pertanyaan wartawan, bagaimana dia bisa tahu telepon genggamnya (*handphone*) miliknya disadap, dan seberapa jauh perbedaan kemampuan alat sadap milik Polri dibanding alat sadap milik KPK. Menjawab pertanyaan itu, Susno menjawab sekenanya saja dengan perumpamaan yang berkelebat lintas di pikiran. Saat itu di dinding akuarium di ruang kerjanya ada seekor cecak merayap.

“Ya, jelas dong saya tahu,” katanya santai. “Alat sadap KPK itu kan seperti cecak, kalau punya polisi kan seperti .....

Susno tertegun sekejap, menerawang, seakan mencari padanan di langit-langit ruangan kerjanya. Kira-kira dengan satwa apa dia akan membandingkan agar sesuai dengan cecak? Namun di ruangnya cuma ada seekor ikan Arawana yang berenang tenang di akuarium. Membandingkan cecak dengan Arawana tentu tidak nyambung. Pada saat itulah salah seorang pembantunya menyela dengan menyebutkan: Buaya.

Susno pun langsung mengambil perumpamaan itu, meski

tadinya dia hampir menyebut tokek. “Ya, kalau punya polisi kan seperti buaya,” katanya berseloroh.

Sebenarnya ini sebuah percakapan ringan biasa. Sama seperti ungkapan-ungkapan canda antara para sobat di tengah masyarakat, atau pada lelucon *slapstick* yang selalu hadir di televisi. Ini cuma metafora. Adam Malik pernah dijuluki sebagai Kancil karena akalunya yang panjang. Jagoan Betawi yang hebat disebut dengan panggilan Macan Kemayoran. Seorang teman yang berdomisili di Belanda dengan bangga menyebut diri Harimau Sumatera, karena dia pernah bersepeda mengelilingi dunia. Kesebelasan PSMS disebut Ayam Kinantan. Persib Bandung dikenal sebagai Maung. Sukarno sebagai Singa Podium. Penyanyi orkes yang suaranya sangat bagus dijuluki Buaya Keroncong. Di tanah Melayu, seseorang yang pandai bersilat lidah, berlagak bak Buaya Deli. Penjahat dan penipu adalah Buaya Darat, sementara Buaya Pasar adalah stempel yang dicapkan terhadap pencuri dan pencopet.

“Itu cuma omongan ringan,” ujar Susno. “Mana mungkin polisi saya sebut buaya dan KPK sebagai cecak.” Jadi sebenarnya lumrah saja. Tidak perlu dibesar-besarkan. Namun begitulah kebiasaan di mana-mana, *bad news travels fast*. Bahkan bahasa santun pun bisa menjadi jelek jika dikomunikasikan dengan cara yang salah. Apalagi sebuah seloroh, kelakar dan persendagurauan.

Namun publik sudah heboh. Istilah itu merajalela dan menjadi ungkapan yang sangat populer. Bahkan Kapolri menganjurkan agar penggunaan kata itu sebaiknya tidak dipakai lagi. Seakan-akan dengan istilah itu harga diri bangsa ini sudah dibanting ke titik nadir.

Susno bingung melihat fenomena yang berkembang. Dia tidak pernah bermaksud jelek dan tidak menduga, apalagi merancang semua itu. “Padahal sebenarnya kan terbalik,” kata Susno miris. Menurut Susno, jika ditilik dari kewenangan dan kekuasaan, justru yang cecak itu adalah polisi, dan yang buaya itu adalah KPK, karena kewenangan KPK jauh lebih besar ketimbang kewenangan Polisi. Susno tahu persis mengenai hal itu sebab dia ikut merancang undang-undang KPK.

“Kewenangan KPK itu didesain sedemikian hebat agar dapat membatat gurita korupsi seluar biasa apa pun!” ujarnya.

*What's done cannot be undone.* Entah mengapa yang tampil di pemberitaan media cuma perbandingan peralatan sadap saja, tanpa menyinggung perbandingan kewenangan. Ini sangat disayangkan. Namun persepsi yang salah itu harus diperbaiki. Tidak bisa dibiarkan. Harus diberikan kisah yang sebenarnya, *the truth, nothing but the truth.*





**#7**

**"Ha! Suap  
Rp 10.000.000.000?"**

Masya Allah!

"Dosa apakah yang telah hamba-Mu perbuat, ya Tuhan, sehingga tuduhan ini dijatuhkan kepada diriku? Saya merasa sangat terhina dan terkutuk. Sepanjang usia yang saya jalani, tak pernah saya menyakukan uang yang bukan milik saya. Memikirkannya saja saya tidak pernah. Mengapa ada fitnah sekejam ini?"

*"Ha! Suap Rp 10.000.000.000?"*

Keluh kesah ini dibisikkan Susno setiap hari, setiap jam dan detik, ditumpahkannya dalam doa di sela-sela salat lima waktu. Hatinya terguncang, perasaannya tertikam, hari-harinya gamang, namun batinnya tabah dan pikirannya terus diperkuat. Susno tidak mengizinkan alam pikirannya berkabut dan menjadi kalut. Dia harus menjaga kejernihan dan kece-  
rahan berpikir. Dia merekonstruksi hal-hal yang terjadi dan menelaah, apakah ada bintik-bintik kesalahan dalam tindak-  
tanduknya. Susno mencoba memelihara objektivitas dan menjaga keseimbangan dalam melakukan *trace-back*.

Susno mengingat-ingat, itulah hari ketika dia mulai menyadari bahwa telepon genggam miliknya tersadap. Secara gamblang dia belum memiliki bukti nyata, tetapi naluri Bhayangkara dan ketajaman intuisi yang sudah menempel di jantungnya selama 32 tahun berbisik kepadanya. HP-mu disadap, begitu suara yang didengar batinnya.

Penyadapan itu dilaporkan Susno kepada Pimpinan Polri pada suatu rapat staf di bulan Desember 2008. Dan karena penyadapan ini akan sangat bisa mengganggu tugasnya sebagai Kabareskrim, Susno bersama beberapa sejawat mulai mengadakan pelacakan. Susno ingin tahu, siapakah, pihak manakah, serta atas maksud dan tujuan apakah penyadapan itu dilakukan? Mereka lalu membuat skenario pembicaraan per telepon yang dilakukan antar beberapa orang, termasuk dengan Lucas, pengacara Budi Sampoerna, bos besar Sampoerna Group.

Selain itu, Susno juga mendatangi jajaran pimpinan KPK

untuk melakukan klarifikasi. Dua kali dia datang ke sana untuk menanyakan hal itu. Toh KPK bukan lembaga yang asing baginya, karena sebelumnya mereka sudah pernah bekerjasama. "Semasa menjadi Kapolda Jabar, saya banyak melakukan kerjasama dengan KPK," kata Susno. "Saya sangat erat dengan KPK. Perlu diketahui, ada 126 anggota saya dari Bareskrim yang ditugaskan di KPK."

Susno meminta agar penyadapan itu disidik. Permintaan yang lumrah dan beralasan, namun ada kendala. Jajaran pimpinan KPK tidak bisa melakukan penyidikan karena menilai tidak cukup bukti untuk melakukan penyidikan.

Susno tidak memaksa. Dia sangat mengerti prosedur dan paham mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tetapi tetap dia tidak bisa mengusir keresahan hatinya, karena tanpa adanya penyidikan, dia seakan-akan sedang berada di tubir jurang. Tapi Susno tetap saja memainkan perannya dengan baik, berusaha tidak panik, tidak kalut, meskipun dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan datang menerpanya. "Itu *feeling* saya," ujar Susno.

Intuisi Susno ternyata benar. Berita buruk memang selalu cepat tersebar. Istilah Cecak-Buaya menggelinding ke mana-mana. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami tendensi turun dan Susno persis berada di titik gempa itu. Penyadapan atas *handphone*-nya kemudian mencuat dan menjadi *headline* di berbagai media massa. Bahkan berita itu semakin dahsyat dan mengerikan.



Hampir semua koran dan televisi kemudian memberitakan bahwa Susno telah memberi bantuan kepada Budi Sampoerna untuk mencairkan dana simpanan Sampoerna Group di Bank Century. Imbalannya Rp 10.000.000.000,-

Masya Allah! Seluruh media massa, cetak, elektronik audio dan elektronik audio-visual secara serempak dan berduyunduyun memuntahkan *rumour* itu ke kerumunan masyarakat. Susno tak kuasa menahan arus pendapat yang datang bagai tsunami itu. Dia hanya bisa berserah, terutama kepada Yang Maha Kuasa.

“Tuhanku, tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang Kau ridhoi, berilah hamba-Mu ini kekuatan untuk melewati petaka yang dilaknatkan orang buatku.”

Di ranah internal Polri, Susno menyerahkan masalah yang dihadapinya itu kepada Kapolri. Dan Bambang Hendarso kemudian menugaskan Irwasum dan Propam untuk memeriksa Susno. Perlu dicatat, Lembaga Irwasum dan Propam di lingkungan Polri adalah lembaga yang sangat kredibel dengan kinerja teruji. Selama ini, Irwasum dan Propam sudah menangani dan memeriksa kasus-kasus yang melibatkan beberapa Jenderal Polisi. Beberapa di antaranya telah dijatuhi sanksi pidana. Tidak seorang pun boleh mengecilkan kredibilitas kedua lembaga Polri ini. Apalagi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan lewat pelaporan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

(MAKI) serta pengacara petinggi KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Bibit dan Chandra).

"Mungkin ada pihak-pihak yang ragu dan bercuriga, mencemooh dengan mengatakan itu seperti jeruk memeriksa jeruk, menyebut sebagai proforma, tapi saya tegaskan, lembaga Irwasum dan Propam adalah lembaga yang sangat *firm*, kokoh dan kuat di lingkungan Polri," kata Susno. "Saya menyambut baik proses pemeriksaan atas diri saya, karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan."

Susno pun diperiksa, ditanya berbagai hal, dihadapkan pada data-data yang berkembang di lapangan. Susno bergeming. Dia hadapi semua itu dengan satu kata: kejujuran. Dia tak perlu mengarang-ngarang cerita, karena memang tidak ada yang harus direkayasa. Semua mengalir sewajar air, bertiup sehalus angin.

"Saya membeberkan semua apa adanya, sesuai apa yang terjadi, dibalut dengan kejujuran saya dan kesaksian saya kepada Allah. Niat *ingsun* tulus, saya *nothing to lose*," katanya.

Setelah mengikuti prosedur pemeriksaan Irwasum dan Propam yang memakan waktu berhari-hari, akhirnya Polri sampai pada satu kesimpulan. Hasil itu dituangkan dalam Surat Kapolri tertanggal 8 Oktober 2009, dengan No. Pol.: R/2647/X/2009/Irtwasum. Isinya, Susno dinyatakan tidak

bersalah, karena tuduhan yang dijatuhkan atas dirinya sama sekali tidak terbukti.

Demikian juga ketika gugatan MAKI dan praperadilan pengacara Bibit dan Chandra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi-lagi Susno menghadapi proses panjang itu dengan ketulusan dan keterbukaan. Hingga pada titik akhir, Pengadilan kemudian memenangkan Susno.

Alhamdulillah! Allah memang Maha Besar.



**#8**

## ***"Time Will Heal"***

**T**idak bersalah! Tidak terbukti! Himpitan batu besar yang membebani pundak seharusnya sudah tidak ada lagi. Begitulah anggapan Susno.

Namun dia salah kira. Ada surat atau tidak ada surat, masyarakat sudah mengambil kesimpulan. Pengaruh pemberitaan yang akurasinya belum bisa dipastikan, yang disajikan sepotong-sepotong dan terpisah-pisah membuat

perca-perca berita tidak terjahit menjadi kesatuan peristiwa. Pengaruh desas-desus ternyata sudah berjalan jauh melebihi kadar masalahnya.

Bagaimana menjelaskan kepada khalayak yang sudah terlanjur terbawa arus curiga? Susno tidak melihat ada cara yang efektif, karena adalah sebuah kemusykilan untuk mengubah pandangan masyarakat dalam waktu yang pendek. *"Rome was not build in a day,"* katanya getir.

Tidak ada jalan lain, Susno pun berserah kepada Yang Maha Kuasa. *Time will heal*, demikian dia beranggapan. Waktu yang berjalan ini pasti akan membereskan semua itu. Begitupun, berserah bukan berarti pasrah. Susno tetap melakukan upaya-upaya penjelasan untuk meyakinkan segala pihak bahwa dia memang tidak pernah berbuat hal yang diributkan itu.

Dalam upayanya itu, Susno mengakui, dirinya memang pernah dua kali berkirim surat kepada Direksi Bank Century. Pertama pada tanggal 7 April 2009 dengan surat bernomor R/217/IV/2009/Bareskrim. Dan yang kedua adalah 10 hari sesudah itu, persisnya pada tanggal 17 April 2009, dengan surat No. Pol.: R/240/IV/2009/Bareskrim. Menurut Susno, kedua surat itu sama sekali bukan atas inisiatif dirinya, tetapi karena ada permintaan dari Direksi Bank Century.

"Harus diingat, surat itu bukan perintah pencairan dana atau permintaan bantuan untuk pencairan dana," tegas

Susno. Surat ini hanya surat keterangan klarifikasi yang menyatakan, berdasar hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh tim yang melibatkan beberapa instansi, terbukti bahwa dana 18.000.000 dolar AS milik Budi Sampoerna yang semula diduga bodong, ternyata benar-benar ada. Sertifikat depositonya ada dan benar-benar asli, kemudian dananya pun memang ada.

"Jadi itu bukan dana fiktif," jelas Susno. "Hanya saja, dana itu sudah dicairkan dan diambil oleh Dewi Tantular, tanpa seizin Budi Sampoerna. Jadi tidak dicairkan oleh pemilik deposito." Dengan demikian menurut Susno, urusan selanjutnya bukan dan tidak menjadi urusan Polri lagi, sebab untuk menentukan dibayar atau tidak dibayar, itu sepenuhnya urusan Bank.

Menurut Susno, keberadaan dan sifat surat itu juga sudah tidak ada masalah, karena telah diklarifikasi tanggal 8 Oktober 2009 dengan surat Kapolri No. Pol.: R/2647/X/2009/Itwasum. Di dalamnya dinyatakan bahwa tindakan yang diambil Susno sudah benar dan masih berada dalam lingkup kewenangan Bareskrim.





**#9**

## **Ke Singapore Bukan Liar**

**M**asyarakat juga heboh sewaktu mendengar Susno pernah bertemu Anggoro Wijaya di Singapore. Banyak yang heran, mengapa Direktur PT Masaro yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan itu tidak langsung ditangkap? Perbincangan apa yang terjadi antara mereka? Jangan-jangan ini ada kaitan dengan dana Rp 10.000.000.000 itu. Macam-macam dugaan timbul.



Susno tidak menyalahkan pendapat masyarakat. Semua ini karena tidak ada penjelasan komprehensif. Informasi yang sepenggal-sepenggal ditambah simpang siur pendapat para pakar membuat persoalan jadi rancu. Orang tidak tahu lagi mana yang salah mana yang benar, tidak tahu lagi akar permasalahan.

“Saya ke Singapore itu diperintah Kapolri. Dan sudah tentu atas sepengetahuan Beliau,” ujar Susno. “Itu bukan perjalanan liar, tetapi perjalanan dinas atas biaya negara.”

Menurut Susno, kepergiannya ke Singapore merupakan bagian dari tugas untuk membawa dan mempertemukan Tim Penyidik dengan Anggoro. Sebelum bertemu, Anggoro yang penuh ragu meminta jaminan bahwa dia tidak akan ditangkap. Dan Susno memberi jaminan itu.

Perlu dipahami, status Anggoro Widjojo pada saat itu bukanlah sebagai ‘Tersangka’, melainkan sebagai ‘Saksi Korban’ yang sangat dibutuhkan keterangannya. Adapun status ‘Tersangka’ dilakukan secara mendadak oleh KPK setelah hampir satu tahun Anggoro berada di luar negeri. Demi menjaga keseragaman tindakan, Polri juga sudah melakukan pengecekan kepada pimpinan KPK, namun pemberitahuan dari KPK ke pihak Polri tidak pernah ada dan tidak jelas. Yang jelas, perbedaan status Anggoro itu bukan tanggung jawab Susno, karena dirinya tidak dilibatkan dalam menangani kasus pimpinan KPK.

“Saya memang membawa Tim Penyidik ke sana. Tapi hasil dari penyidikan itu saya tidak tahu,” ujar Susno. Dia merasa tidak perlu tahu karena masalah itu bukan tanggung jawabnya. Itu adalah pekerjaan tim khusus lain yang posisi dan kendalinya tidak di bawah komando Susno. Dan setelah menjamin dan mempertemukan, Susno langsung angkat kaki, pulang ke Jakarta.

Atas lontaran pertanyaan masyarakat mengapa Anggoro tidak langsung ditangkap di Singapore, Susno gamblang menidakkan. “Mana bisa!” sergah Susno “Itu suatu hal yang tidak mungkin.”

Susno menjelaskan, sebenarnya masyarakat juga tahu bahwa polisi Indonesia tidak mungkin bisa melakukan penangkapan di negara-negara lain tanpa sepengetahuan aparat berwenang setempat. Hal ini sangat sensitif, apalagi hingga saat ini antara Indonesia dan Singapore belum ada perjanjian ekstradisi.

“Lihat saja, banyak buronan Indonesia yang bersembunyi di sana,” kata Susno. “Dan nyatanya kita tidak bisa berbuat apa-apa.”





**#10**

## **"Saya Tribrata-5! Bukan Truno-3!"**

**A**rus pemberitaan bergulung-gulung dan sudah tidak dapat dibendung. Gelombangnya berkecamuk mengikuti alun peristiwa yang secara berkesinambungan terjadi. Masyarakat tersedot dalam putaran itu, membaca dan mendengar serta berpendapat di mana-mana. Kebenaran menjadi nisbi. Tidak ada kepastian, semua

tergantung orang yang memandang. Tak ada kemutlakan, segalanya terserah penilaian masing-masing.

Penilaian-penilaian yang relatif itu terus berlanjut selama pemeriksaan dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan terhadap Anggoro. Menurut Direktur III Mabes Polri, Bibit dan Chandra diancam dengan pasal 23 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU 20/2001 tentang Tipikor, jo pasal 421 KUHP, dan atau pasal 12 huruf e jo pasal 15 UU 31 1999, Jo UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Ancaman minimalnya satu tahun, maksimal enam tahun," kata Kombes Pol Yovianus Mahar.

Setelah diperiksa berulang kali, akhirnya pada Rabu 29 Oktober 2009, kedua petinggi itu resmi ditahan di Mabes Polri, untuk kemudian dipindahkan ke Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, dua hari kemudian.

Indonesia pun menggugat. Nuansa perlawanan terhadap tindakan Mabes Polri itu sangat besar. Dengan kesamaan cara menilai, *Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto* menembus angka 1.416.160. Pendapat-pendapat di halaman *Wall* Facebook itu menumpah segala kesalahan dan menghujat tindakan Polri. Adalah Susno sebagai Kabareskrim yang mendalangi penangkapan itu, begitu anggapan orang banyak.

"Kata orang wajah saya kayak setan," ujar Susno getir. Namun dia tak ingin tenggelam dalam sedih. Dengan senyum lirih dia menerima kenyataan itu. Meski sudah bicara jujur dan tulus, hantaman terhadap Susno terus datang dan datang lagi, memporak-poranda segala. *The damaged is done*. Susno tersudut ke dinding batu, dituding dengan jutaan telunjuk, diserapah habis-habisan.

Apalagi setelah Selasa, 3 November 2009, saat pemutaran sadapan pembicaraan telepon Anggodo Wijaya, adik kandung Anggoro, di Mahkamah Konstitusi selesai didengar, jutaan ujung tombak cacian menghunjam kepada Susno. Hampir semua lapisan masyarakat awam, cerdik pandai, para pakar dan media merangsek dengan cercaan dan membicarakan kebobrokan dirinya. Susno dinilai sebagai sosok yang melakukan rekayasa.

Sungguh luar biasa hebat gelombang opini publik itu. Namun apakah semua mengerti apa yang terjadi? Tidakkah mereka ingin melihat rentetan kisah yang sebenarnya? Mengapa sedemikian mudah dan terburu-buru memberi vonis?

"Itu fitnah keji yang membunuh karakter saya," ujarinya sembari menggeleng kepala. Jika selama ini tidak memelihara iman dengan baik, ingin rasanya Susno berteriak ke langit menuding takdir. Atau menyesali jalan hidupnya sebagai Bhayangkara Negara.

Tapi Susno menekan perasaan ke sudut hatinya yang terdalam. Dia juga mengajak beberapa teman untuk bercakap-cakap.

“Lihat dan dengar,” anjurnya merujuk transkrip pembicaraan itu. Di baris-baris halaman itu, sama sekali tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Susno merekayasa kasus Bibit dan Chandra. Dia sama sekali tidak pernah bicara dengan Anggodo, bertelepon pun tidak. Yang terdengar di rekaman itu cuma namanya beberapa kali disebut-sebut, sama dengan nama-nama lain, termasuk nama Susilo Bambang Yudhoyono.

“Lantas apa bedanya dengan saya?”

Banyak yang berpendapat bahwa nama Susno disebut-sebut sebanyak 28 kali dengan sebutan Truno-3. Padahal, sebutan Truno-3 itu bukan dirinya dan tidak tertuju ke arah dirinya. Truno-3 itu adalah *call-sign* yang diperuntukkan bagi Direktur III Kombes Pol Yovianus Mahar yang saat itu bertugas sebagai Ketua Tim Penyidik.

Bahkan Anggodo sendiri, saat disidik di Bareskrim Polri, sudah dengan tegas mengakui bahwa yang dimaksudkannya sebagai Truno-3 itu adalah Direktur III Brigjen Pol Yovianus Mahar.

“Jadi jelas, kan?” kecam Susno. “Saya ini bukan Truno-3! Saya ini Tribrata-5!”

Untuk dimaklumi, jabatan Susno di jajaran Bareskrim disebut dengan nama Guruh-1. Sementara di jajaran Mabes Polri, jabatan Susno sebagai Kabareskrim itu dijuluki sebagai Tribrata-5. Jabatan lain juga punya *call-sign* sendiri-sendiri. Kapolri dijuluki Tribrata-1, Wakapolri disebut Tribrata-2, Irwasum sebagai Tribrata-3 dan Propam adalah Tribrata-4.

"Dan Tribrata-5 itu Kabareskrim! Itu panggilan saya," tegas Susno sekali lagi. "Bukan Truno-3!"







**#11**

## **Kapolri Terlanjur Lapor**

**P**enjelasan Susno yang menegaskan dirinya bukan Truno-3 ini sebenarnya sudah bisa membuat mata publik terbuka lebar. Tapi apakah kita mau memahami? Tidak banyak masyarakat yang mengerti istilah-istilah ini. Dan banyak pula yang merasa nyaman jika membiarkan mata tetap terpicing. Apalagi bagi mereka yang sudah *kadung* berpendapat bahwa Truno-3 adalah Susno Duadji. Kepakaran, kebandelan, rasa malu hati membuat banyak

orang tetap menuding ke arah Susno. Padahal sudah jelas bahwa yang dimaksud di dalam rekaman sadapan itu adalah Yovianus Mahar.

“Sekali lagi, Truno-3 itu bukan Kabareskrim, sehingga mana mungkin saya bisa merekayasa?” tegas Susno. “Ini sumir, apalagi jika hanya bersandar pada transkrip.”

Memang Susno tidak mengeluh. Tapi dia juga tidak berpasrah. Dia menggugat. Dia mempertanyakan. “Saya sejak awal tidak diikuti dalam penyidikan kasus-kasus yang terkait KPK,” ujar Susno. “Untuk diketahui, kasus itu diemban oleh Tim Khusus yang langsung dibentuk oleh Kapolri dan juga bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.”

Menurut Susno, penyidikan kasus pimpinan KPK itu diawali dari adanya keinginan Kapolri untuk mengungkap motif yang ada di balik pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Kapolri lalu menunjuk Wakabareskrim Irjen Pol Drs. Hadiatmoko untuk mengkoordinir penyelidikan dan penyidikan. Dalam mengemban tugas itu, Hadiatmoko membentuk lima tim.

Namun setelah bekerja relatif lama, tim ini tidak menghasilkan apa-apa. Mereka tidak bisa menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mengungkap motif pembunuhan. Padahal Kapolri sudah terlanjur melaporkan kepada Presiden bahwa motif pembunuhan Nasruddin itu disebabkan adanya kejahatan suap yang melibatkan pimpinan KPK. Bisa

dimengerti jika Kapolri merasa kelabakan dan malu, karena laporannya kepada RI-1 tidak terbukti.

Karena dinilai gagal, Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko pun dicopot. Posisi Wakabareskrim pun dipindahkan ke pundak Brigjen Pol Dik Dik Mulyana. Kapolri kemudian membentuk tim baru di bawah komando Kombes Pol Yovianus Mahar, dan menunjuk Brigjen Pol Dik Dik Mulyana sebagai koordinator. Tugas utama mereka adalah mencari kasus yang dapat menjerat pimpinan KPK.

Seperti yang sudah sama kita ketahui, Tim Penyidik itu akhirnya dapat menciptakan kasus yang menjadikan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Sebagai hadiah, masing-masing mereka kemudian diberi bintang baru di pundak. Yovianus menjadi Brigjen Pol, sementara Dik Dik Mulyana menjadi Irjen Pol.

Inilah sebenarnya sumber kontroversi itu. Dan Susno sama sekali tidak berada dalam lingkaran itu.

“Perlu dicatat, penyidikan itu sepenuhnya di bawah kendali Kapolri dan saya selaku Kabareskrim tidak diberi peran signifikan, alias di-*by-pass*,” tegas Susno.





**#12**

## **Kata Orang Wajah Saya Kayak Setan**

**S**etelah Mahkamah Konstitusi membuka rekaman sadapan, suasana tanah air bergonjang-ganjing. Desakan publik menggebu-gebu, menuntut agar Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga diberhentikan dari tugas karena nama kedua orang itu banyak disebut-sebut.

Desakan itu bergaung juga di istana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Abdul Hakim Ritonga telah menyatakan mengundurkan diri secara lisan dan surat resmi pengunduran dirinya akan disusulkan ke Jaksa Agung. "Secara lisan dia menyatakan, kalau dia menjadi beban institusi, dia akan mengundurkan diri. Lisan," ujar Jaksa Agung Hendarman Supanji. "Dia akan segera menyampaikan secara tertulis pada saya."

Jika Abdul Hakim Ritonga menyatakan mundur, bagaimana dengan Susno? Menurut Kadiv Humas Irjen Pol Nanan Soekarna, Susno sudah mengajukan pengunduran diri kepada Kapolri, namun apa alasannya masih tidak jelas. "Alasannya apa, saya belum baca suratnya. Hanya Kapolri yang tahu," kata Nanan pada jumpa pers di Mabes Polri, Kamis 5 November 2009. Nanan pun tidak tahu apakah pengunduran diri Susno terkait rekaman kriminalisasi KPK atau rasa tanggung jawabnya. "Mengundurkan diri karena kasus atau tanggung jawab kita belum melihatnya. Sampai nanti Tim Pencari Fakta yang memeriksa," tambahnya.

Menurut Susno, ini benar-benar sebuah tindakan pimpinan dan institusi Polri yang bisa dikategorikan sebagai pembohongan terhadap publik. "Semua itu tidak benar!" hentak Susno. "Kenapa? Karena saya tidak mau mundur, dan pimpinan Polri tidak punya alasan untuk memundurkan saya!"

Jika hati publik peka dan mengerti masalah, memang ter-

asa ada keganjilan di situ. Pengunduran diri Susno ini terkesan janggal, karena Anggodo yang jelas-jelas aktor utama justru tidak ditetapkan sebagai tersangka, sementara Susno yang namanya disebut dan disalahmengerti sebagai Truno-3 justru mengundurkan diri sebelum diperiksa oleh Tim Pencari Fakta (TPF) yang lebih dikenal dengan sebutan Tim-8.

Tim-8 memang memberi apresiasi atas keberanian Susno mengundurkan diri. Dan menyebut tindakan itu sedikit mengobati luka masyarakat. "Sukarela mengundurkan diri, paling tidak sementara, supaya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat yang luka sedikit terobati," kata Ketua Tim-8 Adnan Buyung Nasution setelah mendengar Kapolri membuat pernyataan bahwa Susno sudah mengajukan surat pengunduran diri. "Itu bentuk tanggung jawab seorang satria yang memulai tradisi baru," kata Buyung.

Tetapi, benarkah Susno sudah mundur? Pernahkah dia mengajukan surat permohonan pengunduran diri?

"Huh! Mana ada itu! Satu detik pun saya tidak pernah mundur!" tutur Susno tegas.

Susno menilai Kapolri berbohong, karena dirinya sama sekali tidak pernah mundur. Sikap ini karuan saja membuat repot pimpinan Polri. Dan perubahan pun terjadi lagi. Berita yang kemudian disebarkan menyebutkan bahwa Susno hanya dinonaktifkan sementara.



Perubahan yang cepat ini membuat Tim-8 prihatin. Sikap Kapolri yang hanya menonaktifkan sementara dinilai sebagai sikap tidak tegas. "Presiden meminta agar terhadap semua pejabat yang namanya disebut-sebut dalam rekaman harus diambil langkah tegas, dibebastugaskan. Kalau bahasa Bang Buyung nonaktif tetap," ujar Sekretaris Tim-8 Denny Indrayana.

Lantas bagaimana? Memang benar kata Buyung bahwa luka masyarakat sedikit terobati. Tetapi pada tanggal 18 November 2009 luka itu berdarah kembali ketika dengan gamblang publik menyaksikan pertemuan Komisi III DPR RI dengan jajaran Polri. Saat Kapolri tidak hanya datang bersama jajaran, tetapi juga bersama Susno Duadji. Bukankah Susno sudah dinonaktifkan? Meskipun Susno hadir tanpa berpakaian dinas, tidakkah itu berarti Susno sebenarnya belum nonaktif?

Tanda tanya pun bergelantungan di langit-langit ruang. Kapolri tampaknya memahami nuansa itu. Dia kemudian menyatakan bahwa Susno telah aktif kembali ke jabatan semula karena dinilai tidak bersalah.

Menurut Susno, ini sebuah kebohongan juga. Seandainya saja publik mau membaca tanda-tanda dan tidak terseret arus pendapat yang besar namun belum tentu benar, maka publik bisa mengerti semuanya. Mengapa Susno tidak mundur? Mengapa Kapolri Bambang Hendarso tidak berani memundurkan Susno?

Berbagai spekulasi dan desas-desus timbul di tengah masyarakat. Ada yang bilang Susno itu konco Bambang Hendarso, jadi mana mungkin memundurkan teman sendiri. Ada juga yang menyebut bahwa Kapolri melindungi Susno. Sinyalemen lain menggambarkan bahwa Susno itu orangnya SBY, jadi wajar saja jika dia tidak dimundurkan. Dugaan lain mengemukakan bahwa Susno banyak memegang rahasia polisi dan memegang beberapa kartu daun terup yang bisa dipakainya untuk melancarkan serangan balik.

Susno terkekeh atas simpang siur selentingan itu. “Pada hal saat itu saya cuma ingin memberi sinyal bahwa saya sedang menegaskan kebenaran dengan menunjuk sosok yang bersalah,” jelas Susno seraya memperagakan. “Hei, inilah yang bersalah, ini orangnya! Bukan saya!”

Sayang tidak banyak yang memahami gerak tubuh Susno. Semua lebih memilih tersentak dan terlonjak kaget. Keterkejutan itu kemudian bermuara menjadi kebencian, terutama ketika Susno angkat bicara. Ketika dia mengangkat sumpah, banyak bibir mencibir. Tatkala dia menitikkan airmata, orang-orang mencemooh. Ada yang mencap itu sebagai airmata buaya. Sebab, dengan mengantungi uang jasa senilai 10.000.000.000 rupiah, Susno tidak seharusnya menangis. Kan sudah kaya, begitu penilaian orang.

Dan Susno tertunduk jengkel, nyaris tak bisa berkata-kata, terpaksa menyerahkan arah pembicaraan kepada kedua atasan yang duduk di sampingnya, Wakapolri Komjen Pol

Makbul Padmanegara dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Menurut Susno, kedua petinggi itu memperlakukannya seperti anak kecil dengan terus berwanti-wanti agar tidak terlalu banyak bicara.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Jelas Susno tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri. Dan jelas tidak pernah ada pengaktifan kembali. "Apa yang mau diaktifkan jika sebenarnya saya tidak pernah mengundurkan diri?" sangkalnya. Ketika kepada Komisi III Kapolri santai menerangkan hal pengunduran diri dan pengaktifannya kembali, dia sudah mau berdiri menyela untuk menuturkan kejadian sesungguhnya. "Tapi Pak Makbul menahan saya!"

Maka tak ada lain yang bisa dilakukan Susno selain menyeka airmata. Dia sudah tak kuasa membendung tetesan itu. Duduk di sebelah Makbul, dia jadi orang yang *mellow*. Mengikuti kehadiran Bambang Hendarso, dia terlihat redup. Tidak mencerminkan kegagahan dan kelantangan, ibarat kangkung tersiram air panas.

"Saya tak pernah menitikkan airmata seperti itu," ujarnya terduduk diperdayakan nasib. Inilah tangis pertama Susno, yang tetes karena membayangkan nasib keluarga. Melintas di ruang ingatannya wajah kedua cucu kecil yang belum mengerti apa-apa, tergambar paras kedua anak dan mantu, serta muncul wajah istri yang teraniaya. "Betapa ternodanya keluarga saya," ujar Susno. Jangankan membela mereka, membela diri saja saya tidak mampu!"

Sebelum saat haru itu, Susno adalah sosok tegar yang tidak mudah menyerah. Dia bukan anak cengeng dan bukan anak manja. Dia adalah pria baja yang siap mati untuk keyakinan, tidak punya airmata untuk menyesali hidup yang sedari kecil sudah menderita sebagai anak supir dari keluarga miskin.

Maka, ketika diberi kesempatan berbicara, Susno pun terbata-bata, seakan ada gumpalan kabut menyumbat di tenggorokannya. Sulit baginya untuk memilih kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan kontroversi. Matanya nyaris pejam tanpa sorot sinar yang tajam, pandangannya tidak menghunjam, lebih banyak merunduk atau melirak-lirik ke kiri kanan.





**#13**

## **Indonesia Tak Memberi Rasa Iba**

**K**ehadiran di Komisi III itu memang pemunculan Susno yang paling gamblang sejak dia melemparkan perumpamaan cecak versus buaya. Itu juga penampilan umum pertama sejak namanya disebut-sebut dalam rekaman sadapan yang diputar Mahkamah Konstitusi. Lewat tayangan *live* televisi dan radio, masyarakat otomatis

memindai sosok yang disalahmengerti sebagai Truno-3 itu. Para wartawan membludak mendekati dengan jepretan kamera. Dia dideteksi bagai seekor kutu di bawah stateskop, disuryakanta untuk mengetahui makhluk dari *species* apakah dia sebenarnya.

Dan tiba-tiba: Indonesia pun membencinya.

Meski airmatanya jatuh di sela-sela keringat yang cucur, tetap saja Indonesia tidak memberi rasa iba. Ini dia manusia busuk itu, begitu kira-kira penilaian banyak orang. Tapi jika saja semua kita sabar menanti perkembangan, pastilah godam nan ditimpakan tepat ke ubun Susno itu akan kita sadari sebagai ketergesa-gesaan. Bukankah kita tidak tahu persis apa yang sudah dan sedang terjadi? Semua masih misteri.

Wahai, bahkan diri sendiri tidak berhasil kita kenal, bagaimana pula kita bisa mengenal orang lain? Sesungguhnya, pengetahuan kita tentang Susno hanya fragmentasi. Ketika kita bertemu atau melihat sosok gempalnya, kita pun terperangkap oleh kilatan berita tentang dia, terbawa oleh amuk setelah mendengar rekaman sadapan.

Tampaknya kita merasa puas memerangkap orang lain dalam bayang-bayang ketidakadilan. Doyan terpengaruh cerita yang tersebar. Diri kita ternyata suka bercermin pada kesan awal. Itu pulalah yang membuat kita gemar berpen-

dapat. Kita terkontaminasi oleh kungkungan pikiran, yang celaknya, memang kita pelihara baik-baik agar menjadi identitas. Kita tak mau pusing-pusing dan enggan memberi ruang untuk berpikir jernih dan segar. Kita langsung saja menjatuhkan gandin besar persis di ubun-ubun Susno.

Dan ketika dia terhenyak, kita pun tertawa terbahak-bahak!







**#14**

## **Peristiwa Menggelinding Cepat**

**M**ulai hari itu, di wajah Susno terbersit raut muka teraniaya. Tapi dia juga terkesan meradang. Pada Jumat, 6 November 2009, saat diundang dan diminta keterangan oleh Tim-8 ke Gedung Wantimpres, Adnan Buyung Nasution menyapanya dengan menanya status Susno. "Perwira Tinggi di Mabes Polri," jawab Susno, datar saja.

Dalam pertemuan itu Susno menerima banyak pertanyaan, antara lain perihal pengunduran dirinya, penegasan tidak ada suap, perihal surat keterangan Kabareskrim guna kepentingan pencairan dana Budi Sampurno, kemunculan namanya di penyadapan KPK, kunjungan ke Singapore untuk menemui Anggoro, istilah cecak-buaya, tindakannya yang mengesankan menerima tas kosong sebagai bentuk kontra intelijen, dan perannya dalam kasus Bibit dan Chandra.

Sementara itu di luar, hiruk-pikuk pendapat berseliweran menuntut agar Susno dicopot dari jabatan. Dugaan keterlibatannya dalam kasus Bibit dan Chandra harus diusut. Susno dinilai menimbulkan polemik di masyarakat sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebagai pimpinan, Kapolri harus menindak tegas anak buahnya. Harus mengambil langkah pencopotan, sebab antara mundur dan dicopot itu berbeda. Jika Kapolri masih mempertahankan Susno, itu malah *blunder* bagi Kepolisian.

Adnan Buyung bahkan mengeluh. "Kenapa Susno Duadji kuat betul? Ada apa di belakangnya?" ujar Ketua Tim-8 itu. Bagi Tim-8, cara dan model apa pun tidak persoalan, yang penting Susno harus lengser dari Kabareskrim, supaya masyarakat menilai ada tanggung jawab Polri. Jika dibiarkan, masyarakat bukan cuma minta Susno, tapi Kapolri yang musti turun. Polri harus membangun *trust*. Presiden minta Tim-8 bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan aparaturnya penegak hukum.

Tapi masa tugas Tim-8 cepat kadaluarsa. Dan di Selasa, 17 November 2009 itu, wajah Susno kembali sumringah. Mulai hari itu dia kembali menjabat sebagai Kabareskrim. "Kapolri sudah menjelaskan di forum DPR, saya tidak aktif hanya selama pemeriksaan Tim-8," katanya sembari mengumbar senyum.

Namun kembalinya Susno sebagai Kabareskrim menuai kritik. Ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap kerja Tim-8. Menurut beberapa pakar, itu juga berarti tidak menghormati Presiden. Bahkan ada yang berpendapat, penonaktifan Susno hanya akal-akalan untuk meredam tekanan publik. Kapolri dianggap melindungi bawahannya demi kepentingan korps kepolisian.

Tak jelas. Banyak yang tidak dapat dijabarkan dengan kata-kata. Demikian juga pemanggilan terhadap Harian Kompas dan Harian Seputar Indonesia (Sindo) pada Kamis 19 November 2009. Dasar pemanggilan itu berkenaan pemberitaan tanggal 4 November 2009 tentang rekaman dugaan rekayasa Bibit dan Chandra.

Semua menjadi lebih tidak jelas, karena di keesokan hari, Jumat 20 November 2009, pemanggilan itu dibatalkan lewat telepon. Besar kemungkinan, pembatalan itu karena pemanggilan melahirkan serangan sengit kepada Polri. Konon, Kapolri sempat kaget atas respons yang muncul, sehingga dia memerintahkan agar pemanggilan dibatalkan.

Yang membuat hal itu menjadi semakin aneh adalah ketidak-konsistenan Polri dalam melakukan pemanggilan, karena setelah dibatalkan beberapa jam, pemanggilan Kompas dan Sindo dilakukan, lagi-lagi masih lewat telepon. Padahal Kadiv Humas Irjen Pol Nanan Soekarna sudah menegaskan bahwa Polri tidak jadi memanggil kedua media itu.

Berbagai spekulasi pun timbul. Nanan mengatakan pemanggilan Kompas dan Sindo tidak bermaksud mengkriminalisasi media massa. Juga bukan atas laporan Anggodo. Pernyataan ini sangat berbeda dengan isi surat panggilan yang ditujukan ke Kompas. Pada surat 18 November 2009 itu, Kompas diminta menghadap penyidik Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Polri, atas laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Untuk dimaklumi, laporan tertanggal 30 Oktober itu merupakan laporan Anggodo yang tidak terima (*complaint*) karena disadap KPK.

Nanan mengaku terkejut dengan reaksi publik terkait pemanggilan ini. Menurutnya telah terjadi *miscommunication*. “Kita kan tidak mungkin mengundang. Kalau mengundang itu kawinan. Polisi itu harus memanggil. Saya kaget opini yang muncul seperti ini, katanya kriminalisasi media. Kalau memang jadi seperti ini, dibatalkan saja. Media massa itu kawan kami,” kilah Nanan.

Susno yang baru kembali ke jabatan lamanya sebagai Kabareskrim merasa namanya terbawa-bawa. Dia langsung me-

lakukan bantahan memerintahkan pemanggilan Kompas dan Sindo. "Pemanggilan Pemimpin Redaksi atau wartawan itu bukan atas perintah saya, karena saat itu saya belum sepenuhnya aktif melaksanakan tugas," kata Susno.

Susno menjelaskan, pemanggilan seperti itu adalah tindakan teknis dalam rangkaian penyidikan, dan tidak perlu diatur dan diperintahkan Kabareskrim. "Kewenangan pemanggilan media massa ada pada penyidik yang menangani perkara saat itu," katanya.

Menurut pengetahuan Susno, pemanggilan itu berawal dari rasa simpati Kapolri terhadap aparat Kejaksaan yang disadap pembicaraan teleponnya, apalagi hasil sadapan itu diberitakan oleh banyak media. Untuk menunjukkan simpati, Kapolri mendatangi Jaksa Agung di kantornya. Dan sekembalinya, Kapolri memerintahkan agar pelaku penyadapan diproses oleh Direktorat II.

Untuk memuluskan perintah itu, Polri melakukan proses tindakan yang cepat. Direktur II Brigjen Pol Edmon Ilyas dinilai tidak tepat lagi untuk menduduki pos itu, dan harus diganti secepatnya dengan Kombes Pol Raja Erizman.

Dalam kasus ini, Susno tidak diikutsertakan karena dia dinilai menjadi bagian dari kasus KPK. "Lagipula perlu dimaklumi, pemanggilan adalah bagian dari Penyelidikan dan Penyidikan yang keputusannya tidak perlu sampai ke level Kabareskrim, apalagi sampai ke tingkat Kapolri. Pemanggilan

cukup hanya menjadi urusan Kepala Unit saja,” ujar Susno. “Jadi tidak adil dan kurang tepat jika pemanggilan wartawan atau redaksi media itu dibebankan ke pundak saya.”

Menurut Susno, Kapolri pasti tahu hal yang menjadi kebijakannya sendiri. “Saya sebagai Kabareskrim tidak punya wewenang mengambil kebijakan, karena kasus ini bagian dari kasus pimpinan KPK, di mana saya tidak dilibatkan,” jelas Susno.

Sekali lagi Susno mengingatkan posisinya saat itu. “Bukan hanya kasus KPK, tetapi juga pada kasus ikutan saya tidak diikutsertakan, seperti penyadapan dan lain-lain. Semua di luar kendali saya. Tim-tim itu semua bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.”

Namun apa pun alasannya, para pengamat Polri menilai pembatalan dan pemanggilan lewat telepon menunjukkan betapa rendahnya kualitas kerja korps Bhayangkara. Itu mencerminkan tidak profesionalnya Polisi dan semakin menunjukkan betapa rendahnya kinerja Polisi.



**#15**

## **Putting-beliung Mabes Polri**

*A*rah angin sedang tidak menentu, berganti-ganti asal dan tujuan. Kadang ke Barat, kadang ke Timur, lantas berembus pula ke segala ufuk. Tidak ada kepastian. Namun putting-beliung itu terus berputar di Mabes Polri. Telegram rahasia bernomor polisi 618/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sudah dibuat.

Isinya: Susno dicopot dari Jabatan sebagai Kabareskrim,



untuk selanjutnya dimutasikan sebagai perwira tinggi Polri *non-job* di Mabes Polri. Menurut Kapolri, pencopotan resmi itu merupakan bentuk tanggung jawab Kapolri terhadap arahan Presiden.

Di hari Rabu, 25 Nopember 2009 itu, Susno baru saja sampai di rumah. Jam dinding menunjukkan angka 20:15 WIB. Bayang-bayang letih menaungi wajahnya. Paras pria usia 55 tahun itu ramai diukir guratan-guratan senja. Hari-hari belakangan ini, hidupnya berjalan keras. Lubang-lubang menganggang menunggunya terjenggang. Jutaan tombak mengarah menantinya berdarah.

Seusai mandi, salat Isya dan makan malam, Susno duduk di depan televisi. Dia ingin meluruskan pinggang. Namun begitu melihat siaran televisi, Susno menjublak! Hatinya teriris silet yang tajam.

Di layar kaca itu, terpampang wajah keras Irjen Pol Nanan Sukarna menyampaikan berita mutasi di lingkungan Polri. Ada 35 Perwira Tinggi dan Perwira Menengah yang bergeser posisi. Nama Susno berada pada urutan pertama. "Komisaris Jenderal Polisi Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc, jabatan semula Kabareskrim Polri, dimutasi untuk jabatan baru sebagai Perwira Tinggi di Mabes Polri", begitu berita yang disampaikan.

Grubyaakk...!!! Berbagai perasaan kecamuk di batinnya. Pikiran galau. Ini artinya sama dengan *non-job*! Meja kosong!

Tidak ada pekerjaan khusus! Susno merasa dilalimi. Marwah-nya teraniaya, karena dia sama sekali tidak pernah diberi tahu atau dibisiki. Lagipula, sudah beratus kali mutasi di tubuh Polri berlangsung, namun tidak pernah ada yang diumumkan dengan *press release* seperti ini. Ke mana perginya etika yang selama ini dipegang Mabes?

Bagi Susno, mutasi seperti ini bersifat demosi yang biasanya dijatuhkan sebagai hukuman terhadap Perwira yang sudah melewati proses pemeriksaan, pembelaan dan penjatuhan hukuman. Proses ini sama sekali tidak pernah terjadi atas dirinya. Batinnya ingin menjeritkan protes, tetapi kematangan jiwa Bhayangkara melarangnya. Dia harus berkepal dingin, mengunyah dan menelan penghinaan tanpa gerutu. Karut marut ini tak boleh disikapi dengan carut marut.

Susno duduk dengan selanjor sempurna. Kepala dibenamkannya di antara bantalan kursi. Bagai adegan film yang ditayang ulang secara *slow-motion*, ingatannya menyuguhkan gambar-gambar tempo dulu. Ingat ketika pertama kali dia menjalani 280 kilometer untuk mendaftar masuk institusi Kepolisian, terkenang pada senyum simpatik Kombes yang membiarkannya berterus terang, waswas akan paras ayahnya Suadji dan terkenang kepada Siti Athema, ibu yang melahirkan dan menyusuinya. Bayang-bayang belasan wajah terus bergelantungan di urat syarafnya. Istrinya Herawati, anaknya Indira dan Diliانا, serta Almer dan Akmal, kedua cucu mungilnya. Sosok menantu dan sanak juga menyambanginya.

Ya Allah ya Tuhanku, apa arti semua ini?

Sepanjang karir selama 32 tahun di Kepolisian, belum pernah dia merasa tertindas seperti ini. Alangkah tidak adilnya perlakuan ini, setelah semua penugasan dan pengabdian, keikhlasan dan kerelaan, komitmen dan kesetiaan, ketaatan dan kepatuhan, tanpa pernah bertanya mengapa dan ke mana dia ditempatkan. "Sebagai Bhayangkara sejati saya selalu patuh, taat, loyal, setia, jujur, bertanggung jawab dan tak pernah mengeluh," gumamnya.

Susno menggeleng kepala berulang-ulang dan beranjak ke lantai dua untuk berwudhu. Di kamar yang hening, dia dirikan salat dan mohon pengampunan Allah Azza Wajala, atas segala dosa yang diperbuatnya, besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja.

Bukankah itu telah dijanjikan Allah kepada kita semua? *Wahai sekalian orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) sembahyang; karena sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar.*

Mimpi buruk Susno itu sebenarnya sudah diawali sinyal sejak Presiden membentuk Tim Pencari Fakta tentang dugaan rekayasa kasus Bibit dan Chandra. Susno mencatat, di hari pertama bekerja, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang tertentu, Tim-8 sudah mengeluarkan rekomen-

dasi -yang terkesan sebagai tekanan- kepada Kapolri. Rekomendasi itu adalah: agar membebaskan Bibit dan Chandra, menangkap Anggodo dan menonaktifkan Susno Duadji.

Di antara tiga rekomendasi itu, butir yang paling sulit dilakukan Kapolri adalah menonaktifkan Susno, karena tidak ada alasan tepat untuk melakukan itu. Kapolri pasti menyadari itu, sebab Susno sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam penyidikan Bibit dan Chandra. Jadi bagaimana mungkin menonaktifkan perwira yang tidak pernah ditugaskan menangani kasus? Bukankah penyidikan itu di-*handle* oleh tim yang dibentuk langsung di bawah kendali Kapolri?

Sejauh ini, hal yang mungkin bisa dijelaskan Susno kepada Tim-8 cumalah isu pelontaran istilah cecak-buaya, isu membantu pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century dengan dugaan imbalan Rp. 10.000.000.000, isu berbicara di televisi tanpa izin dan isu pemanggilan wartawan. Tapi tentang perekayasa kasus Bibit dan Chandra? "Saya tidak tahu itu. Kapolri sebagai pemberi komando, dia yang sangat tahu tentang itu," ujar Susno.

Susno sudah dihakimi. Kapolri terkesan tidak membelanya. "Padahal apa sih tugas yang tidak saya patuhi?" terawang Susno. Tapi dia tetap tidak mau berontak. Dia memilih diam dan membenteng sajadah. Inilah saat menyungkurkan diri bersembah untuk mengadukan segala sesuatu kepada Allah, tempat dia bersandar selama ini. Dalam kekerdilannya

dia ingin bercakap-cakap, menyampaikan kesah dan keluh, memohon segala kemurahan dan pengampunan. Selalu ada saat untuk membentang sajadah panjang, selalu ada saat untuk bersujud dan memasrahkan segala petaka kepada Yang Maha Besar.

Allahu Akbar! Susno tunduk, rukuk dan sujud, tak melepas kening dari kelembutan sajadah, berserah kepada Allah, penuh seluruh.



**#16**

## **"Kan Jabatan Saya Pati?"**

**M**aka serah terima jabatan Kabareskrim pun dilaksanakan pada Senin 30 November 2009. Susno menyerahkan jabatannya kepada Irjen Pol Ito Sumardi. Pencopotan Susno dinilai bisa meredam konflik yang semakin merebak. Langkah itu juga untuk memenuhi tuntutan publik. Namun menurut beberapa pengamat, pencopotan Susno tak serta merta bisa memulihkan citra Polri. Butuh pembuktian untuk mengembalikan kepercayaan

masyarakat. Citra yang sudah rusak tidak mudah dibersihkan. Harus ada pembuktian lapangan.

Justru pembuktian itu yang semakin ngawur. Ketidakkonsistenan terus terjadi, karena pencopotan Susno selalu dengan alasan yang tidak jelas. Pada acara sertijab, Kapolri mengatakan pencopotan Susno itu sebagai mutasi biasa dan untuk kepentingan organisasi, bukan karena kriminalisasi KPK.

Meski masih berbalut tanya, Susno menerima keputusan itu. Walau di hatinya teronggok rasa tidak puas, sebagai 'Jenderal Manis' di kalangan Polri, dia patuh. Namun kepatuhan tidak sama dengan kepasrahan, juga tidak identik dengan ketidakberdayaan. Di sela-sela kepatuhan menerima mutasi, Susno merasa gelisah. Resah itu bukan karena dia ingin mempertahankan kedudukan, meski posisi merupakan hal berarti bagi karirnya. Berpuluh tahun mengabdikan sebagai Bhayangkara Negara, Susno merajut helai demi helai prestasi untuk meraih kelayakan hidup. Ini hari semua lenyap!

Susno menekan kegelisahan diri jauh ke lubuk hati, tak ingin kestabilan pikirannya terganggu. Pikiran positif adalah salah satu resep untuk menjaga kesehatan.

"Meski saya sering baru bisa tidur sekitar jam dua jam tiga, saya merasa tetap sehat. Paling-paling cuma sakit tenggorokan," kata Susno. "Sekarang tensi saya 120/70. Berat badan naik. Makan enak, tidur enak, mau ke kantor suka-suka,

masih berolahraga, termasuk nyetir sendiri. Saya tidak punya supir dan tidak dikawal sejak jabatan saya dicopot.”

Meski sulit, Susno mencoba bijak dan lega. “Jabatan itu, begitu kita terima pagi, sore harus siap-siap diambil lagi. Justru bersyukurlah jika dia sudah pergi. Karena jabatan itu membawa amanah. Amanah itu jika tidak kita lakukan, dosa!” katanya. Dia menyikapi prahara itu dengan keimanan. “Paling tidak saya sekarang terhindar dari dosa. Dosa terhadap jabatan. Jabatan itu kan harus membawa kemaslahatan bagi orang lain,” petuahnya.

Di Mabes, Susno mengaku tidak memiliki kamar kerja khusus. Sekaligus tidak punya *job description* (perincian kerja) yang jelas. “Jadi saya mutar-mutar saja di halaman Mabes, atau bertamu di ruangan lain. Begitu saja, sambil menunggu saat pulang. Kan saya *nggak* ada ruangan,” katanya. “Semua ruangan di Mabes itu ruangan saya. Jadi semua gedung, semua halaman sampai lapangan sepak bola, itu kantor saya.”

Menurut Susno, jabatannya tidak tercantum di dalam struktur. “Jadi tugas saya apa? Suka-suka saya. Hari itu mau ke kantin, boleh. Hari itu mau baca koran atau mau nongol ke ruangan-ruangan lain, boleh. Mau keluyuran, silakan,” tukas Susno. “Sebab memang tidak ada ruang kerja yang harus dimasuki dan tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan.”



Tapi dia dianggap Polri telah mangkir. Kata 'mangkir' dan 'kluyuran' itulah yang membuat Susno kesal. "Mangkir? Mengapa saya tidak boleh keluyuran? Kok begini-begini dipersoalkan? Kan jabatan saya Pati?" sindir Susno.



**#17**

## **"30 Juz di Atas Kepala Saya!"**

**M**emang, pada Kamis 7 Januari 2010 itu, Susno tidak masuk kerja, karena 'kluyuran' ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia diminta menjadi saksi yang meringankan terdakwa Antasari Azhar pada sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain.

"Bagimanapun saya harus memenuhi panggilan pengadilan itu," kata Susno sembari menunjuk Undang Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur pentingnya keterangan saksi. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa, *keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.*

Lebih lanjut Susno juga merujuk kepada Pasal 65 KUHP yang berbunyi, *'Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya'.*

Maka tidak ada alternatif lain, Susno harus 'kluyuran' untuk hadir di persidangan. Dia hadir dengan memakai seragam, lengkap dengan tiga bintang di pundak.

"Saya itu saksi!" tegas Susno lagi. Menurutnya, seorang saksi harus membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Tidak perlu tahu siapa terdakwa. Jika ada yang merasa dirugikan, silakan. Jika ada pihak yang merasa diberatkan, silakan. Yang merasa tersinggung, silakan. Jika seorang saksi sudah berpikir bahwa si A akan tersinggung, dan kalau begini si B yang akan tersinggung, itu sudah tidak benar. Apalagi kalau ada anggapan bahwa nanti yang bebas adalah si A, yang akan dihukum si B, itu sudah tidak benar.

"Jika begitu yang terjadi, maka kesaksian itu sudah tidak berdasarkan apa yang *'dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan*

*dia alami sendiri!* Sebelum bersaksi saya kan harus mengatakan, “Demi Allah Saya Bersumpah,” kata Susno. “Jadi ini asma Allah yang saya bawa. Jangan main-main, 30 juz lho di atas kepala saya.”

Seorang yang bersaksi palsu, hukumnya dunia. Tapi kalau sudah Demi Allah, tidak ketahuan di dunia, begitu Susno melanjutkan. Dan derajat kita sudah lebih rendah daripada gembala domba yang ditemui Saidina Umar. Susno kemudian mencuplik kisah itu.

“Dombamu kasikan saya satu, nanti saya kasih beberapa dinar. Tak akan ada yang tahu. Nanti kalau boss-mu tanya, bilang saja di makan singa. Tak ada yang tahu selain kita berdua,” katanya,

“Oh, tuan lupa, kita memang berdua, tapi ada Tuhan yang melihat,” jawab sang gembala.

Cerita itu sangat menginspirasi Susno. “Saya suka sikap gembala itu. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Masak sih saya ini lebih rendah dari gembala domba?”

Menurut Susno, di depan sidang dia hanya menyampaikan hal-hal yang dia ketahui. “Saya tuturkan tentang adanya tim yang dibentuk Irjen Pol Hadiatmoko. Dia itu wakil saya, tapi dia mendapat penugasan langsung dari Kapolri, dan laporannya juga langsung ke Kapolri. Tidak melewati saya. Itu artinya saya tidak tahu!” jelas Susno.





**#18**

## ***“Read. Sudah R, Berarti Terbaca!”***

**M**engenai prosedur kehadirannya sebagai saksi, Susno menjelaskan secara sederhana. Dia bilang, dia sendiri juga lupa harus hadir waktu itu. “Saya pikir hari itu belum Kamis, masih Rabu. Jadi saya enak saja ke kantor. Ke kantor kan santai saja, jam 10. Kantornya mana, ya Mabes. Ruangnya mana, ya semua ruangan itu ruangan saya,” kata Susno.

*“Read. Sudah R, Berarti Terbaca!”*

"Kalau mempersoalkan mengapa saya bersaksi pakaian dinas, wah ini jadi aneh. Saya kira ini wajar saja." Susno lalu memisalkan seorang polisi yang kecurian sepeda motor. Pencurinya dapat, maka sewaktu sidang polisi itu hadir dengan pakaian dinas. "Kok ini tidak dipersoalkan? Harus adil dong!" Kalau seseorang atas nama pribadi, walaupun baju dinasnya rangkap tujuh, dia tetap pribadi juga. Jadi, pribadi apa tidak, itu sebenarnya bukan ditentukan oleh pakaian, tapi oleh formalitas surat penunjukan. Kalau sebagai pribadi, tidak perlu izin.

"Kalau ada perintah tertulis tidak boleh hadir ke sidang dengan pakaian dinas, berarti saya salah dan siap dihukum. Tetapi kan tidak ada," lanjut Susno. Ketentuan meminta izin dan dilarang mengenakan seragam dinas tidak diatur dalam kode etik Polri. Sementara kode etik itu posisinya lebih rendah dari Undang Undang (UU) yang mengharuskan seseorang hadir di persidangan. Kode etik tidak boleh mengalahkan UU. Di kode etik pun tidak dinyatakan bahwa hadir di persidangan harus dengan izin.

Susno mengaku kehadirannya di persidangan Antasari tidak mewakili Polri. Dia hadir sebagai pribadi karena dinilai tahu tentang kasus itu. Apa betul perlu izin? "Irjen Pol Hadiatmoko itu Wakabareskrim, wakil saya. Dan dia tidak pernah minta izin pada saya ketika dipanggil sebagai saksi di sidang Wiliardi Wizar. Tidak ada yang meributkannya," jelas Susno. Menurut Susno, Hadiatmoko hadir di sidang dengan seragam lengkap.

Sebaliknya, kenapa Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iriawan hanya berpakaian sipil biasa, padahal kesaksiannya dinas? Dalam kesaksian anggota Polri di sidang pengadilan tidak ada ketentuan soal pakaian. "Lalu kenapa saya diributkan?" keluh Susno.

"Tetapi sebagai orang Timur, saya bukan minta izin, tetapi lebih tinggi dari izin. Saya lapor. Tertulis. Bukan pakai kertas. Kalau pakai kertas lama prosesnya, kan? Saya pakai elektronik," ujar Susno sambil menunjukkan *Blackberry*-nya.

"*Read*. Satu jam sudah *read*. Sudah **R**, berarti terbaca. Ini ke Kapolri. Sesprinya. Kalau lapor itu tidak ada tanggapan, berarti boleh, kan? Melapor itu perlu. Dan saya yakin, tidak mungkin Kapolri melarang. Masak melarang orang bersaksi?"

Kehadiran Susno di persidangan membuat tanggapan-tanggapan berkembang. Mabes Polri menilai tindakan itu indisipliner. Berbagai dasar dikemukakan. Dan Susno terheran-heran. Dia mempertanyakan *statement* Kepala Divisi Humas Irjen Pol Edward Aritonang pada Jumat 8 Januari 2010, yang mengatakan Susno tidak masuk kerja dua hari tanpa pemberitahuan. "Beliau tidak memberitahu ketidakhadirannya, ya mangkirlah," kata Edward. Menurut Edward, tindakan Susno itu termasuk kategori pelanggaran disiplin sebagai anggota Polri, dengan ancaman mendapatkan sanksi teguran dari pimpinan Polri. "Susno termasuk



Pati yang memiliki tugas untuk mendampingi Kapolri,” tegas Edward.

Lebih jauh Edward menjelaskan, seorang anggota Polri dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran berat apabila mangkir dari dinas. Bila tidak masuk kerja tanpa alasan selama tiga bulan, ancaman sanksi adalah penahanan 21 hari, penundaan pangkat, penurunan pangkat (demosi) hingga Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atau bahkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Susno menyangkal semua itu. Tetap merasa heran, tidak mengerti mengapa dia dicap mangkir dan kluyuran. Dia lantas mencontohkan perlakuan yang diberikan kepada mantan Kapolri Da’i Bachtiar. “Kenapa dulu kluyuran Pak Da’i tidak dipersoalkan? Selesai jadi Kapolri, Pak Da’i masih punya sisa 10 bulan sebelum menempati pos baru. Dan dia kluyuran terus, sampai ke Amerika, keluar negeri dan pada jam dinas dia main golf. Kok dia *nggak* diperiksa sampai hari ini?”

“Keanehan lain adalah mengenai prosedur yang beralih-alih,” kata Susno. “Mulai dari uniform, beralih kepada izin, beralih kepada apa, beralih kepada apa. Saya bilang pada Humas, jangan terlalu sering beralih-alih, nanti seperti memberi pasal kepada Bibit dan Chandra. Beralih-alih.” Menurut Susno, Polri seperti mempertontonkan ulang hal yang pernah dilakukan terhadap Bibit dan Chandra. “Selalu diubah-ubah,” katanya.

Begitu juga penjelasan Polri saat menjelaskan perlakuan terhadap Susno dengan menarik segala fasilitasnya. Namun kata Kapolri, tidak ditarik. Kata Kadiv Humas juga tidak. Tapi besoknya Kapolri bilang, fasilitas itu ditarik karena Susno sudah tidak menjabat.

"Yang mana yang benar? Saya saja yang Polisi bingung, apalagi rakyat. Kan lebih bingung lagi nanti," kata Susno.





**#19**

## **Substansi atau Prosedur?**

**T**ampil di persidangan, bagi Susno, bukan hal yang menyenangkan. Dia tidak suka. Tapi karena itu merupakan kewajiban seorang warga negara, dia harus hadir. Dan itu tidak berbenturan dengan Kode Etik Kepolisian. Apalagi kode etik Polri tidak mengatur seseorang yang hadir di persidangan harus seizin atasan. Juga tidak pengaturan tentang pakaian yang dikenakan. Tidak ada pelarangan memakai baju dinas. Terlebih jika kesaksian itu tidak mewakili institusi Polri.

“Sampai detik ini, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah. Apakah kesaksian saya? Atau karena baju yang saya pakai? Masak baju saja buat heboh se-Indonesia,” kata Susno senyum. “Atau mungkin....., karena mereka khawatir jawaban saya bisa bikin gerah orang-orang di Mabes, ya?” katanya.

Kehadirannya sebagai saksi di pengadilan menurut Susno adalah hal yang biasa-biasa saja. “Saya hadir karena nama saya disebut-sebut di situ,” sambung Susno. kepadanya dilontarkan berbagai pertanyaan yang sangat mudah dijawab, karena semua berdasarkan kenyataan di lapangan. Kalau seorang jujur dalam menjawab, pasti tidak ada kesulitan. Justru jika mengarang-ngarang jawaban seseorang akan menemui kesulitan.

Kepadanya ditanyakan apakah ada tim khusus di bawah Hadiatmoko. Susno menjawab bahwa pada awalnya dia tidak tahu. Dia juga tidak tahu apa misi tim itu, keresersean atau bukan. “Kemudian baru di ujungnya saya tahu bahwa tim itu gagal,” kata Susno.

Reaksi atas kehadiran Susno di persidangan Antasari menimba suara-suara miring juga. Heboh lagi, heboh lagi. Media massa menyiarkan reaksi petinggi Polri. Kadiv Humas mengatakan Susno telah melanggar disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Tapi Susno menyangkal.

“Apa yang saya langgar? Substansi atau prosedur? Kalau

substansi, apa ada yang salah dengan materi kesaksian saya itu?" gugat Susno. Dia bertanya, apakah salah jika seorang penegak hukum menyampaikan kebenaran di sidang pengadilan? "Sebagai seorang polisi, saya tahu betul hal ini. Polisi sebagai penyidik, menyerahkan hasil sidikannya ke Kejaksaan, yang selanjutnya menyerahkan ke pengadilan.

"Dan kalau itu mengenai prosedur, di mana salah saya? Saya kan sudah mengirim SMS ke Kapolri. Sudah **R**," sambung Susno mengulang penjelasannya.

Tuduhan terhadap Susno memang tidak pernah jelas. Seragam, jam kantor, tidak minta izin atau materi kesaksian? Berubah-rubah seperti tuduhan terhadap Bibit dan Chandra. Memang, andaikan diperiksa, Susno adalah perwira bintang tiga pertama yang diperiksa karena dugaan pelanggaran etika. Ini tidak biasa terjadi.

Menurut Susno, Kapolri sendiri tidak pernah mempermasalahkannya kehadirannya. "Buktinya saya tidak ditegur atau dipanggil. Masak sih polisi jadi kerdil begitu, mempersoalkan izin, prosedur, seragam dan meninggalkan kantor pada jam dinas?"

Namun demikian, Susno siap diperiksa kapan pun. "Saya siap memberikan keterangan kepada penyidik," tegasnya, sekaligus siap menerima hukuman jika terbukti bersalah. "Apabila yang dituduhkan kepada saya benar adanya, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan ketentuan," tandasnya.

Tapi lagi-lagi, kecentangperenangan terjadi. Sepekan berlalu, Mabes Polri ternyata belum punya arahan yang jelas. Mereka terbelah, tidak satu kata dalam menanggapi kesaksian Susno. Hasil penyelidikan Protram menyimpulkan Susno melanggar disiplin dan kode etik karena telah menyampaikan kesaksian tanpa izin dari Kapolri. Mereka akan segera menggelar sidang kode etik untuk Susno Duadji. Sebaliknya Tim Klarifikasi yang dipimpin Kaba Intelkam Irjen Pol Saleh Saaf tidak menemukan adanya pelanggaran disiplin atau kode etik. Tim bentukan khusus ini sudah meminta Protram menghentikan proses penyelidikan.

Ini membuat Kadiv Humas Edward Aritonang jadi bingung. "Justru hari ini saya lagi bingung karena seharian saya *nggak* ada di kantor. Saya masih mau cek dulu ke dua-duanya," ujar Edward pada Jumat 15 Januari 2010. "Tapi sampai sekarang, kedua-duanya belum bisa dikontak. Saya juga mau tanya dulu ke Irwasum. Pak Nanan belum saya kontak."

Karut marut memang, meskipun pada akhirnya, di Senin 18 Januari 2010 Mabes Polri menganggap kasus Susno sudah selesai secara internal. Tapi demi menjaga soliditas Polri, detail keputusan untuk sementara sengaja belum disampaikan kepada masyarakat.

"Sudah ada keputusan, tapi tidak diinformasikan ke publik. Yang bisa kami informasikan adalah, kami anggap selesai secara internal," kata Edward Aritonang. Menurut Kadiv

Humas ini, sebelum menyampaikan ke masyarakat luas, Mabes Polri terlebih dulu akan menjelaskan kepada seluruh jajaran Polri. Langkah ini dipilih agar anggota dan PNS Polri mendapatkan kejelasan dari sumber yang resmi, sebelum beritanya muncul di media massa. "Tahap pertama, kami sosialisasikan ke internal dulu supaya tidak terjadi multi tafsir. Kami harus menjaga soliditas 400 ribu anggota dan PNS se-Indonesia," jelas Edward.

Namun menurut Usman Hamid dari Kontras, kasus itu telah memperlihatkan bahwa Polri terjerumus ke wilayah yang sangat dilematis di tubuh internalnya. Di satu sisi, polisi melihat langkah Susno sebagai pelanggaran kode etik, disiplin dan profesi. Tapi di sisi lain, Polri harus memberi pertimbangan hak hukum Susno jika diperlukan hadir di persidangan. Mabes Polri tampak sangat kesulitan menyelesaikan masalah internalnya. Belum tuntas satu divisi menyelesaikan pemeriksaan, Mabes sudah membentuk tim lain lagi. Yang bingung adalah masyarakat. Sebenarnya yang mana yang mau menyelesaikan kasus Susno? Irwasum Nanan Soekarna, Kadiv Propam Oegroseno, atau Kabaintelkam Saleh Saaf? Ini perlu dijawab!

Masyarakat menunggu-nunggu keterbukaan Polri. Jadi kepercayaan kepada polisi tidak semata-mata melalui pencitraan, tapi juga kualitas kinerja internal.







**#20**

## **Angkat Suara, Bukan Melawan**

**S**egala hal yang terjadi akhirnya membuat Susno tercenung. Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang tidak bisa ditelusuri, dipahami dan dimengerti. Dia menerawangkan pikiran ke segala masa. Termasuk saat melamar ke Akpol. Salahkah langkahnya ketika masuk polisi 32 tahun lalu?

Perlakuan yang diterimanya hari-hari ini sangat tidak masuk akal. Salah satunya adalah pengasingan diri yang dikenakan atasnya. Dia dilarang bertemu wartawan. Tidak boleh memberi keterangan pers. Wartawan-wartawan pun tidak bisa mewawancarai karena Susno 'dijaga' untuk tidak berpapasan dengan para pencari berita itu. Kalau ada sesuatu yang harus disampaikan ke masyarakat, dia harus meneruskan ke Humas lebih dulu. Apalagi jika berupa bantahan.

"Cuma yang membuat saya heran, Humas sama sekali *nggak* membantah, malah saya dipojokkan pula lagi," katanya. "Anda tahu? Dari ruang kantor saya ke ruang Kapolri itu jaraknya cuma 25 meter. Tapi karena melewati halaman, saya diwajibkan naik mobil," jelas Susno. "Bahkan salat Jumat pun saya di ruang tahanan, supaya tidak bertemu wartawan."

Menurut Susno, kekhawatiran itu sebenarnya tidak beralasan. "Saya sebagai Pati Polri bintang tiga tentu tahu apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan," kata Susno. "Apa sih yang dikhawatirkan? Apa karena saya terlalu banyak tahu?"

Bukan hanya bertemu wartawan saja Susno dicegah, tetapi dia juga disarankan agar tidak tampil di media televisi. Ini aneh. Padahal selama ini larangan itu tidak pernah ada. Polisi dengan tingkatan Kapolres saja tidak pernah dilarang, asal tahu etika dan tidak merugikan institusi Polri. Bagi Susno, sebenarnya jika disimak baik-baik, penampilannya di televisi itu selalu terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawab, serta sangat bermanfaat untuk institusi Polri.

“Televisi kan dilihat orang banyak,” kata Susno. “Boleh dong saya bicara di sana tentang isu-isu yang menerpa diri saya. Ini kan sebagai klarifikasi untuk diri saya, sekaligus untuk menjelaskan posisi Polri.” Menurut Susno, selama ini, segala sesuatu yang dialamatkan kepada dirinya tidak pernah diklarifikasi oleh Divisi Humas Polri. “Ya, saya *left alone*, ditinggalkan,” katanya.

Karena itulah Susno kembali menggugat keberadaan reformasi yang didengung-dengungkan Polri. Dia merasa reformasi itu sudah mulai tergerus dan tidak lagi dipegang oleh beberapa petinggi Polri.

Begitupun, Susno tidak menempatkan perlakuan yang diterimanya pada prioritas utama. Dia tidak keberatan jika jabatannya diambil dan gajinya dipotong sampai 60 persen. Fasilitas ditarik, mobil diambil dan para pengawal ditiadakan. Pengawasan Densus di sekitar rumah pun bukan masalah besar baginya. Baginya itu soal kedua.

Soal utama yang sangat mengganggu pikiran Susno adalah dampak psikologis terhadap keluarga, terutama kepada istri dan anak-anak, juga kepada cucu-cucunya. Anakanya bahkan terpaksa berhenti kerja. Istrinya juga mulai jarang tampil di tempat umum, termasuk arisan bersama ibu-ibu Bhayangkari. Mereka malu karena Susno diberitakan menerima suap 10 milyar.

“Berita buruk selalu cepat tersebar,” katanya. Tapi Susno tak

menyalahkan wartawan. Menurutnya wartawan tidak salah, apalagi jika berusaha mengangkat fakta. "Tapi apa yang ada di balik fakta itu seharusnya diselidiki juga. Kan tidak sulit?" imbuh Susno.

Susno menolak ketika ada anggapan yang mengatakan bahwa dia cari sensasi. Menurutnya, masyarakat boleh melihat *track-record* dirinya. Sewaktu masih di Surabaya dan berpangkat Letnan Kolonel, dia pernah dicopot dari jabatan berkenaan dengan kasus uang palsu. Saat itu dia diminta oleh pejabat tinggi Mabes merekayasa penyidikan kasus itu. Susno tidak mau. Karena itu dia dicopot dengan alasan tidak loyal.

"Ya, silakan. Dicopot jabatan ya *nggak* apa-apa. Saya terima saja," tanggapnya. "Anak buah saya sudah naik Kombes, saya belum. Saya jadi Letkol itu naiknya tiga kali. Letkol Pol, terus Superintendent, terus jadi AKBP. Ha ha ha... lucu juga!"

Susno menilai kinerja polisi juga sedang mengalami tendensi menurun. "Sewaktu ada pembentukan Tim Pencari Fakta itu, kriterianya tidak jelas. Saya sudah menulis, TPF itu tidak akan berhasil. Presiden silahkan membentuk, tapi Kapolri jangan latah ikut membentuk," kata Susno. "*Nggak* usah pakai Satgas. Caranya mudah. Orang pertamanya saja. Kapolri, jika dia bisa menyontohkan sikap satu kata satu perbuatan, itu sudah luar biasa!"

Susno mengisahkan, sikap satu kata satu perbuatan itu

akan susah dicapai, terutama jika di sebelah ruang Kapolri atau Wakapolri itu masih ada ruangan lain yang disediakan untuk perwakilan dari seseorang yang bukan berasal dari kepolisian. “Luar biasa itu!” serunya. “Jika ada anak buah *nggak* nurut sama orang itu, dicopot. Makanya saya cuma bisa ketawa saja. Lho, duitnya banyak, gimana lagi?”

“Yang saya pakai ini kan bahasa wartawan,” kata Susno. “Semua ini rahasia umum, wartawan-wartawan juga tahu. Jadi kalau besok-besok saya diperiksa, saya akan balik bertanya, apakah yang memeriksa saya itu sudah siap?”

Susno berharap sosok-sosok yang memeriksanya tidak ada yang pernah tersangkut kasus, baik masalah profesi, maupun karena tidak profesional sewaktu menjadi Kapolda. “Bagaimana mau memeriksa jika Propamnya dulu dicopot karena makan anggaran? Masak orang begitu mau memeriksa saya?”

Jika diperiksa, Susno akan bertanya duluan. “Pertanyaan saya, kasus Bapak sudah selesai? Kalau belum, selesaikan dulu, baru memeriksa saya,” katanya tajam sembari menjelaskan bahwa dia akan mengambil sikap jika ada pemeriksaan atas dirinya. “Misalnya saya akan bilang, silakan Bapak duluan. Kan Bapak dicopot dari Kapolda dua kali. Masalah kriminalnya ada, masalah profesinya ada, masalah disiplinnya ada. Sudah tiga masalah. Selesaikan dululah satu!” tegasnya.

Susno memang sedang mengesankan bahwa dia tidak akan

diam. Dia akan angkat suara. Bukan melawan. Sebab bagaimana dia bisa melawan institusi Polri yang dicintainya, yang memberinya kehidupan di dunia ini? "Saya ini anak baik, anak manis," katanya. "Tapi bukan berarti saya harus diam dan tutup mulut." Dia sangat mencintai profesi ini, tetapi itu bukan berarti juga harus mencintai orang-orang yang duduk di dalamnya, apalagi yang tidak jelas kredibilitasnya.

Tapi bukankah sewaktu di depan Komisi III DPR, Kapolri sangat membela Susno? Menurut Susno, Kapolri memang terkesan membela sebab punya alasan sendiri. "Karena dia berbohong ketika menyatakan saya sudah mengundurkan diri. Itu kebohongan pertama. Saya kan tidak pernah mundur!" tegasnya. "Kenapa saya tidak mundur? Karena saya tidak salah. Coba tunjukkan apa salah saya?"

Susno menuturkan ulang, sewaktu mendengar dirinya dikatakan mundur, dia sudah mau berdiri. Tapi niatnya dicegah oleh Wakapolri Makbul Padmanegara yang duduk di sebelah kirinya. Tapi dia tetap kritis dan menekankan bahwa dia belum mundur. Buat apa mundur jika tidak bersalah? Meskipun Tim-8 mengatakan dirinya tidak becus dan dituduh merekayasa.

"Merekayasa yang mana?" tanya Susno seakan berdialog dengan diri sendiri. "Yang di sebelah-sebelah saya inilah yang harus mundur. Harusnya mereka dengan jantan berkata, 'Hei Tim-8, mohon maaf, bukan dia, saya!'" kecam Susno. "Harus kesatria dong!"

Menurut Susno, manusia kalau laki-laki, apalagi pemimpin, apalagi tingkatan jenderal, harus punya sifat kesatria, satu kata satu perbuatan. Ciri-ciri reformis adalah satu kata satu perbuatan.

Susno terus memindai, menekur dan merenung. Dia mencontohkan hal lain lagi yang menyangkut nama Nurcholish Majid. Susno mengatakan, data itu berasal dari tim Kapolri. Tapi selalu berubah-ubah.

“Heran saya, kok dia berani berbohong di depan DPR RI yang merupakan representasi 250 juta rakyat Indonesia?” tanya Susno seraya geleng kepala. “Sehari itu sudah lima kali dia berbohong di forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.” Susno lantas menjabarkan lima kebohongan itu. “Pertama tentang pengunduran diri saya. Kedua mengenai janji dan pernyataan akan mundur dari jabatan kalau kasus Bibit dan Chandra tidak sampai ke Pengadilan. Ketiga sewaktu menjawab pertanyaan anggota Komisi III Bambang Soesatyo. Keempat menyangkut nama Nurcholish Majid. Dan yang kelima soal mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban.”

Inikah perangai seorang reformis?







**#21**

## **Penyidik Sudah Mati**

**S**usno mulai tidak mengerti alam pikiran para koleganya dan menebak-nebak pola pikir mereka. Tegas ke luar, namun berputar-putar ke dalam. Ada yang bilang akan mundur jika tidak sesuai dengan keadilan, tapi kenyataannya tidak mundur-mundur juga.

Menurut prinsip Susno, aparat penegak hukum harus didorong untuk menegakkan keadilan. *Mind-set* di kepolisian dan

kejaksaan harus diubah. Seharusnya atas seseorang yang dijadikan tersangka diberlakukan azas praduga tak bersalah. Polisi boleh saja terus-menerus mencari bukti-bukti.

“Penyidikan memerlukan barang bukti, namun tidak harus dipaksa terbukti,” ujarnya. Tapi kalau memang tersangka tak bersalah, harus dibebaskan. Susno mendeteksi, yang ada di pikiran polisi saat ini adalah bahwa bukti-bukti harus terus dicari. Bila perlu main gebuk.

“Selama pikiran begitu masih di benak, berarti bukan penegak hukum, dong. Itu namanya pembengkok hukum,” ujar Susno. Menurutnya, jika seseorang terdakwa duduk di depan persidangan, jangan ada pemikiran jaksa, polisi dan hakim bahwa orang itu harus dihukum. “Kalau memang tidak bersalah, harus dibebaskan! Supaya bagus. Supaya keadilan tegak.”

Mengenai hal ini sudah lama ditulis Susno. Dalam buku keduanya yang diterbitkan April 2009 dengan judul *Perjalanan KUHAP Seperempat Abad Lebih: Masalah Substansi dan Implementasi*, dia menyoroti mengenai KUHAP.

“Nah, lantas kenapa penyelesaian perkara di Indonesia ini terburuk di dunia?” gugahnya. Menurut Susno, Timor Timur yang mengadaptasi KUHAP Indonesia bisa melaksanakannya lebih bagus daripada Indonesia. Ini masalah sikap, yaitu konsekuen atau mencla-mencle. “Di Indonesia, penyidik sudah mati.”

Masih menurut Susno, di Malaysia penyelesaian perkara juga cukup baik, sekitar tujuh sampai 14 hari. Bagaimana di Indonesia? “Mungkin kita coba batasi maksimal 10 hari,” kata Susno. Menurutnya, hal ini sangat bisa dilakukan asal *mind-set* polisi dan jaksa berada pada frekuensi yang sama. Kalau waktu penyelesaian perkara itu pendek, tidak ada kemungkinan terjadi sogok-menyogok, rekayasa, penghilangan barang bukti, *deal* dan lain-lain.

“Saya yakin hal ini bisa dilakukan di Indonesia, karena Malaysia juga bisa. Harusnya jika ada satu-dua barang bukti, langsung *go!*” tegas Susno. “Toh nanti di persidangan masih tetap bisa memanggil saksi dan mencari alat bukti lain. Kalau sudah terbuka di muka umum, tidak akan ada lagi rekayasa kayak Bibit dan Chandra.”

\* \* \*

Di sisi lain, Susno juga melihat banyak kegagalan yang tumbuh di tubuh Polri. Misalnya saja dalam hal anggaran. Seperti juga di departemen-departemen lain, anggaran selalu menjadi hal yang sensitif. Apalagi jika berhubungan dengan pengadaan barang. Kecurangan dan korupsi sangat mudah terjadi di sini. Barang yang tidak dibutuhkan mendadak bisa menjadi sangat diperlukan, jika anggaran itu diatur oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Begitu juga sebaliknya, barang yang dibutuhkan bisa di-*drop* dari daftar dan tidak dianggarkan jika tidak jelas urusan ‘kiri-kanan’nya.

Susno menyontohkan anggaran untuk pengadaan perangkat IT dalam pemantauan tahanan Polda. Dalam rancangan kerja, alat pemantau itu nantinya akan dipasang di 10 Polda, semuanya *on-line* terhubung ke Mabes Polri. Biayanya cukup fantastis, bernilai sekitar 40 milyar rupiah.

“Saya menentang pengadaan itu, karena menurut saya tidak ada gunanya. Paling-paling cuma untuk melihat tahanan bergerak ke sana ke mari, wara wiri di sekitar tahanan, ke WC dan lain-lain. Dan itu tidak perlu.”

“Buat apa?” dakwanya. “Tahanan Polda itu jinak, *nggak* akan lari.” Karena itulah anggaran yang sudah disusun itu dicoret-coret Susno semuanya. “Semua yang sudah OK-OK itu saya coretin.”

Susno mengatakan, dengan penerapan sistem IT itu, di layar komputer akan terlihat pergerakan para tahanan. Namun sosoknya tidak jelas. Cuma titik-titik yang bergerak berseliweran, sementara tidak tahu siapa orangnya. Petugas tidak tahu yang bergerak itu si A atau si B, karena di layar cuma dilambang sebagai titik-titik. Cuma sebatas itu.

“Kalau tahanan lari, sistem itu tidak bisa melacak, apalagi menghalangi. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa, paling-paling cuma tahu saja,” kata Susno. “Jadi nanti saya sebagai Kabareskrim cuma duduk di ruangan saya dengan mengganguk-angguk kepala saja!” ujarnya sambil menggerak-gerakkan kepalanya. “Lama-lama bisa gila, kan?”

"Tak perlu!" tegas Susno. Menurutnya, untuk memantau tahanan cukup dengan memasang CCTV (*Close Circuit TV*) yang harganya cuma sekitar dua juta. "Jadi kalau 10 Polda, harganya cuma 20 juta. Selesai!"

Merasa terganjal oleh Susno, pihak penyediaan jasa barang itu bertemu Susno dan mengancam akan melakukan arbitrase. Susno tertawa mengakak. "He he, dia lupa, arbitrase itu kan saya jagonya," ujarnya sembari menunjuk kasus Pertamina Karaha Bodas. Seperti penuturannya, dialah yang turun tangan mengurus kasus itu sehingga rekening Pertamina bisa dibuka di Bank of New York. "Jadi silakan saja! Kalau mau arbitrase, silakan. Paling-paling nanti yang terbuka adalah korupsinya," kata Susno.

Cuma saja Susno tidak tahu kelanjutan proses IT itu. "*Nggak* tahu ya, waktu saya sudah 'pergi' ini, mungkin dinaikkan lagi."

Menurut Susno, semua kejanggalan itu bisa diatasi dengan ketegasan. Sikap inilah yang kurang tertonjol di tubuh Polri. "Termasuk Kapolri, *nggak* berani tegas. *Nggak* berani dia. Padahal dia bilang polisi itu reformis," katanya.

Susno melayangkan ingatannya ke suatu rapat pengarahan yang mengingatkan agar hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pengadaan barang dibuat dengan hati-hati. Seorang pejabat tinggi Polri mengingatkan, kalau tidak hati-hati, bisa-bisa setelah pensiun akan dipanggil KPK. Dua kali

Pati itu berkata demikian. Dan pada ketiga kalinya, Susno mengangkat tangan.

“Interupsi! Saya kira tidak demikian. Saya tersinggung kalau dibilang bahwa nanti kalau kita sudah pensiun akan dipanggil KPK. Salah itu! Mustinya, sebelum pensiun, kita bisa ditangkap Bareskrim. Itu baru benar,” kata Susno sembari menjelaskan bahwa Bareskrim bertindak sebelum menunggu orang pensiun.

“Itu kantor Bareskrim, kan dekat benar, sementara KPK jauh di sana,” sambungnya. “Kok nunggu pensiun? Apa *nggak* menghargai Bareskrim? Apakah Bareskrim itu hanya berlaku untuk orang-orang lain?”

Jadi, pendek kata, Susno hanya ingin mengingatkan bahwa setiap polisi harus hati-hati dalam menangani pekerjaannya. “Reformasi itu gampang. *Nggak* perlu nunggu lima tahun. Reformasi itu bisa dilakukan saat ini juga, tapi harus dimulai dari orang pertamanya.”

Namun, sikapnya yang tidak menyetujui pengadaan barang yang tidak sangkil (tepat guna) dan tidak mangkus (berdaya guna), apalagi dengan biaya yang sangat tinggi adalah suatu keharusan, karena dia tidak mau melakukan pemborosan. “Kita tidak boleh sembarang menekan sebagai tanda setuju,” katanya.

Tapi itu pulalah yang kemudian membuat anggaran Bares-

krim untuk tahun 2010 mengalami perubahan. Susno menjelaskan, anggaran ajuannya diturunkan dengan sangat drastis sehingga menjadi hanya sekitar satu persen. "Itu kan sama saja artinya dengan tiada anggaran," ujarnya. Berarti Bareskrim tidak diberi dana untuk pengadaan barang, padahal program yang akan dijalankan adalah dalam rangka Tahun Penegakan Hukum.

"Saya tidak tahu sebabnya," tukas Susno, meskipun setiap orang tahu bahwa Susno sangat mengerti alasan-alasan pemerosotan anggaran itu.







**#22**

## **Penangkapan Robert Tantular**

**M**engenai rentetan kasus Bank Century, Susno mengisahkan langkah-langkah yang dilakukannya. Kasus ini terjadi lebih awal dibandingkan kasus Bibit dan Chandra yang menghebohkan itu. Keterlibatan Susno dalam kasus Bank Century bermula dari adanya perintah Kapolri untuk menangkap Robert Tantular dalam tempo dua jam.

“Kapolri memanggil saya, menjelaskan bahwa perintah itu datang dari Wapres Jusuf Kalla, yang saat itu sedang dalam kapasitas sebagai *acting president* karena SBY lagi berada di luar negeri,” tutur Susno.

Tidak sulit bagi Susno untuk melaksanakan perintah itu. Dia langsung menuju Bank Indonesia (BI). Di sana dia menjelaskan perihal perintah yang diterimanya kepada sejumlah pejabat BI yang waktu itu baru selesai rapat. Semuanya merasa heran dan salah seorang Deputy Gubernur yang berada dalam ruangan bertanya: “Apa sudah ada bukti?”

Dengan santai Susno menjawab: “Bukti awal sudah cukup.”

Robert pun dibawa ke Mabes Polri. Ditahan dan diperiksa. Sesuai perintah Jusuf Kalla, “Tidak lebih dari dua jam!”

Memang kemudian Robert Tantular protes karena dia merasa bahwa penangkapan atas dirinya itu bukan berdasarkan hukum. Itu cuma perintah Wapres Jusuf Kalla. Jadi menurut hematnya, penangkapan itu salah alamat, karena tidak bisa dibuktikan secara jelas. Robert mengatakan dirinya tidak menerima tuduhan perampok yang dikenakan pada dirinya. Itu jelas-jelas merupakan perbuatan pemegang saham pengendali Bank Century.

Menurut Robert, saat itu (21 November 2008) dia diikutsertakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk merekapitalisasi permodalan Bank Century yang terganggu.

Manajemen Bank Century memutuskan untuk menambah modal sebesar 20% dan Robert diberi waktu 35 hari untuk mencari tambahan modal.

Namun baru empat hari, tepatnya 25 November 2008 Robert ditangkap. "Ini sudah menyalahi aturan, tidak bisa dibuktikan secara jelas dan saya akan ajukan banding," celoteh Robert. Menurutny, sudah sejak bulan Januari 2008 dia berusaha keras untuk mencari investor asing baru yang dapat memberi tambahan modal bagi Bank Century. Rencananya investor itu berasal dari Korea dan Timur Tengah, namun karena adanya krisis global di bulan September - Oktober, likuiditas jadi memburuk, sehingga tidak ada langkah lain kecuali meminta talangan dari pemerintah.

*Whatever*-lah. Yang jelas, Robert Tantular akhirnya divonis dengan hukuman penjara empat tahun, dan di tingkat selanjutnya ditambah satu tahun lagi sehingga total lima tahun.





**#23**

## **(Bukan) Testimoni**

**J**ika ditimbang-timbang, energi bangsa ini banyak terkuras untuk menyelesaikan masalah, sesuatu yang pantas disayangkan. Seharusnya energi ini disalurkan untuk berkarya dan membangun agar taraf hidup rakyat meningkat.

Kasus Bank Century telah menguras tenaga dan pikiran kita. Waktu kita tersita. Padahal, menurut hemat Susno, masalah

ini bukan masalah yang rumit. Artinya, jika kita memiliki kemauan yang kuat dan berani mengambil langkah-langkah yang jelas tanpa *ewuh pakewuh*, kasus ini dengan gampang bisa terkuak lebar, selebar langkah Susno pada Rabu siang 20 Januari 2010 saat datang ke ruang rapat Pansus Century.

Dengan *uniform* lengkap, wajah Susno menyiratkan keceriaan. Tak ada guratan beban ketika dia melangkah gagah memasuki ruang sidang Pansus Century. Sejak dari pintu, dia sudah menebar senyum, menyalam setiap anggota sampai ke deretan bangku belakang. Bertukar sapa dengan beberapa di antaranya. Masih dengan senyum lebar.

Susno memang tampak penuh wibawa dengan seragam lengkap polisi. Meski perutnya membesar, namun semua tampak pas. Keyakinan tersirat dari *gesture* tubuhnya. Sangat berbeda dengan penampilannya beberapa bulan lalu, ketika mendampingi Kapolri dan Wakapolri menghadapi Komisi III. Dulu dia terlihat gamang dan duduk manis dengan tangis, hari ini dia membusungkan dada dengan ramah, seakan menyuarakan kata: "Inilah Susno yang dulu anda hujat tanpa dasar yang kuat."

Penampilan Susno pun sangat tangkas. Satu demi satu pertanyaan anggota Pansus dijawabnya detil. Tidak ada keluar jawaban 'tidak tahu' atau 'tidak ingat' dari bibirnya. Segala peristiwa dan data meluncur cepat dari mulutnya, tanpa ada kesan menghapal, seakan-akan di hadapannya

ada tulisan dan gambar yang menggantung. Bahkan dia tak perlu mengingat-ingat. Semua tersusun dengan baik dan dilontarkan dengan redaksi kalimat yang jelas. Ajuan pertanyaan yang sopan dijawabnya dengan sopan. Cecaran pertanyaan ngawur juga dijawabnya dengan senyum. Dia tidak menunjukkan emosi. Dia mengalir seperti air, berhembus seperti angin.

Menyejukkan! Namun kesaksian yang disampaikan Susno malah tidak menyejukkan. Pansus menjadi hangat karena banyak temuan-temuan baru yang diberikan Susno. Pansus yang mulai letih bak kehilangan darah, kembali bergairah. Apalagi ketika di akhir pertemuan, beredar transkrip bersampul kuning yang dipercayai banyak anggota Pansus sebagai testimoni. Padahal menurut Susno itu adalah rancangan buku yang akan dituliskan seseorang buatnya. Namun di dalamnya banyak hal yang mengejutkan, seperti yang dicantumkan di sini, sesuai aslinya:

## **A. PERSOALAN BANK CENTURY ITU SEBENARNYA TERDIRI DARI TIGA KASUS YANG MASING-MASING MEMILIKI MODUS OPERANDI TERSENDIRI YANG BERBEDA SATU SAMA LAIN.**

1. Kasus Murni Perbankan dengan tersangka Robert Tantular dan kroni-kroninya. Mereka melakukan tindak pidana perbankan dengan modus operandi, yaitu kredit fiktif, kontrak kelola fiktif, pencairan deposito valas tanpa



seizin pemiliknya, menggelapkan surat berharga dan LC fiktif dengan jumlah kerugian seluruh sekitar Rp 3,4 Trilyun.

2. Kasus Non Perbankan, yaitu kejahatan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Robert Tantular dan kronikroninya dengan menggunakan Securitas PT Antaboga dan PT SCI yang mengakibatkan kerugian berjumlah Rp 1,565 Trilyun.
3. Kasus dugaan korupsi bailout/penyertaan dana LPS ke Bank Century sebesar Rp 6,762 Trilyun.

Ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ★ Kasus Pertama dan Kedua sudah disidik oleh Bareskrim Polri dengan delapan tersangka. Kasus ini merupakan kasus perbankan, *money laundering*, penggelapan, penipuan dan kejahatan di bidang pasar modal. Sebagian kasus telah divonis oleh Pengadilan dan sebagian lagi masih dalam proses persidangan. Para tersangka yang masih dalam pengejaran karena melarikan diri ke luar negeri adalah Rafat Ali Rizvi, Hesham Alwarraq, Theresia Dewi Tantular, Anton Tantular, Hartawan Alwi dan Hendro Wiyanto.
- ★ Kasus Ketiga adalah dugaan korupsi *Bailout*/Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS ke Bank Century sebesar Rp 6,762 Trilyun, yang saat ini sedang hangat dibahas di

Pansus Hak Angket Century di DPR RI. Kasus PMS yang diduga merugikan negara sebesar Rp 6,762 Trilyun masih dalam tahap penyelidikan Bareskrim Polri, karena penyidik Bareskrim Polri mengutamakan kasus yang merugikan rakyat banyak. Berdasarkan hasil analisa sementara kasus PMS sebesar Rp 6,762 Trilyun terdiri dari dua anak kasus yaitu:

- ★ Kasus Pertama: Pengucuran dana/uang negara tanpa didasari dasar hukum yang kuat, sehingga para pelakunya dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan ‘Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara’. Pihak-pihak yang dapat dijadikan tersangka adalah para pembuat kebijakan yang berwenang memutus pengucuran dana dan pihak yang membantu melahirkan kebijakan.
- ★ Kasus Kedua: Apabila di antara dana yang dikucurkan sebesar Rp 6,762 Trilyun itu ada yang diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima, maka terhadap mereka dapat dilakukan dugaan turut serta melakukan tindak pidana korupsi, pemalsuan, perbankan, penggelapan dan/atau penipuan. Untuk tindak lanjut pembuktian kasus terkait dengan PMS sebesar Rp. 6,762 Trilyun masih perlu dilakukan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti lainnya.

Dari hasil penyelidikan diperoleh kesimpulan sementara sebagai berikut:

- a. Terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KSSK yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan alasan bahwa Penyertaan Dana sebesar Rp. 6.762 Trilyun tidak mendapat persetujuan DPR sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang.
- b. Yang masih memerlukan pendalaman adalah Penyertaan Dana LPS kepada Bank Century senilai Rp. 6.762 Trilyun, sedangkan dana nasabah yang diselewengkan oleh Robert Tantular dan kroni-kroninya adalah kredit fiktif senilai Rp. 278 Milyar, kontrak kelola dana fiktif senilai Rp. 90 Milyar, pencairan valas tanpa izin pemiliknya senilai USD 18 Juta, LC fiktif sebesar USD 75,2 juta. Jumlah keseluruhannya adalah setara dengan nilai Rp. 1,298 Trilyun. Yang harus ditanyakan adalah ke mana selisihnya sebesar Rp. 5,464 Trilyun?
- c. Bahwa untuk melacak ke mana dana tersebut dialirkan tidaklah terlalu sulit bagi Bareskrim Polri, karena dapat dilakukan dengan menyidik manajemen baru Bank Century untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana senilai Rp. 6.762 Trilyun dengan membawa bukti-

bukti otentik dan tidak perlu bergantung kepada instansi lain.

- d. Perhitungan ini didasarkan bahwa dana nasabah yang diselewengkan hanya senilai Rp. 1,298 Trilyun. Tentunya apabila dana tersebut telah diganti, maka Bank pasti akan beroperasi dengan normal. Namun kenyataannya masih ada beberapa nasabah yang belum bisa mencairkan dananya. Salah satu di antaranya Budi Sampoerna.
- e. Penggunaan selisih dana sebesar Rp. 5,464 Trilyun perlu ditelusuri dan apabila ada pihak yang tidak berhak menerima dana itu, maka hal ini akan melahirkan kejahatan baru berupa korupsi. Dan inilah yang dituntut oleh masyarakat melalui Hak Angket.
- f. Menurut LPS untuk SUN, FASBI, Giro BI dan SBI senilai Rp. 1,973 Trilyun, sedangkan menurut Bank Century untuk SUN, FASBI, Giro BI dan SBI senilai Rp. 2,450 Trilyun. Berarti ada selisih sebesar Rp. 477 Milyar.
- g. Untuk dana nasabah senilai Rp. 4,31 Trilyun patut dipertanyakan, karena tidak seluruh dana nasabah diselewengkan oleh Robert Tantular dan kroni-kroninya. Yang diselewengkan hanya senilai Rp. 1,298 Trilyun. Jadi kenapa disediakan dana sebesar Rp. 4,31 Trilyun untuk mengganti dana nasabah?
- h. Cara penelusuran dana ini sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan meminta pertanggungjawaban Direksi

Bank Century terkait dengan pengucuran dana kepada nasabah sebesar Rp. 4,31 Trilyun (yang menurut LPS hanya sebesar Rp. 4,018 Trilyun. Di sini pun terjadi perbedaan perhitungan antara Bank Century dengan LPS sebesar Rp. 300 Milyar).

## **B. ASSET RECOVERY**

Bareskrim Polri telah berhasil melakukan upaya pelacakan asset Bank Century yang disimpan oleh Robert Tantular dan kroni-kroninya, Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi dengan rincian sebagai berikut:

### ***1. Di Dalam Negeri***

Berupa uang senilai Rp. 258,5 Milyar ditambah dengan Saham KSEI sebanyak 3.295.837.885 lembar, dan Saham di PT Bahana Securitas 269.250.000 lembar.

### ***2. Di Luar Negeri***

Temuan asset tersangka di luar negeri senilai Rp. 11,832 Trilyun, terdiri dari sebagai berikut:

- a. Asset milik Robert Tantular total senilai USD 19,25 Juta atau setara dengan Rp 192,5 M
- b. USB AG Bank Hongkong sejumlah USD 1,822,082.67.
- c. Trust Structure di PJK Jersey sejumlah USD 16,5 Juta.

- d. Private Wealth Management Division (Divisi Pengelolaan Kekayaan Pribadi) di British Virgin Island (Inggris) sejumlah USD 927,776.54.
- e. Asset milik Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi (DPO) total senilai USD 1,164 Milyar atau setara dengan Rp 11,64 Trilyun.
- f. Di USB AG Bank Hongkong sejumlah USD 3,503,435.96.
- g. Standard Chartered Bank sejumlah USD 650,005,942 dan sejumlah SGD 4,006.
- h. ING Bank sejumlah USD 388,843,415

Asset milik Robert Tantular yang lain adalah:

- a. Asset di Greensey bernama JASMICO TRUST sejumlah USD 14,8 juta
- b. Asset di Bermuda berupa polis asuransi senilai USD 7,227,573.00.
- c. Asset di Swiss berupa deposit di Dresdner Bank sebesar USD 220 juta

Semua asset yang di luar negeri telah dilakukan pembekuan secara permanen untuk ditindakanlajuti pengembaliannya ke Pemerintah RI melalui Mutual Legal Assistance (MLA). Hal ini baru dapat dilakukan setelah ada putusan Pengadilan

Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang tentunya masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Ada kemungkinan penyelesaian dengan cara cepat yaitu dengan menindaklanjuti surat Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi tertanggal 3 Juni 2009 yang pada intinya bersedia mengembalikan kerugian Bank Century dan bersedia membeli kembali Bank tersebut. Apabila skema ini dapat ditindaklanjuti dan disepakati bersama, keuntungan yang dapat Indonesia adalah:

- a. Dana LPS senilai Rp. 6,762 Trilyun dapat kembali.
- b. Uang hasil penjualan Bank dapat menjadi kas Pemerintah Indonesia, tentunya harga penjualan Bank adalah menurut kesepakatan bersama.

Perlu dicatat, surat dari Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi itu ditujukan kepada Kabareskrim Polri (saat itu) Komjen Pol Susno Doadji. Surat tersebut sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI.

Tawaran itu sudah beberapa kali ditanyakan oleh Pengacara Hesham Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi kepada Kabareskrim Polri (saat itu) Komjen Pol Susno Doadji, namun belum dapat ditindaklanjuti karena belum mendapat petunjuk atau *signal* dari Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Keuangan RI.

- C. Sebagai catatan, Bareskrim memang tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp 6,762 Trilyun tersebut karena pertimbangan sebagai berikut:

**“Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang, sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden. Tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 Trilyun ke Bank Century tidak terlalu sulit.”**

Demikian bagian penutup catatan Susno yang disusunnya di Jakarta, 27 November 2009, saat masih menjabat sebagai Kabreskrim Polri. Catatan yang dibuatnya itu didasarkan pada fakta-fakta yang ada, meski masih banyak ketidaksempurnaan dan kekurangan dalam catatan itu yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dan ada hal-hal yang belum saatnya untuk diungkapkan kepada publik.







**#24**

## **Testimoni yang Bikin Gerah**

**C**atatan Susno itu memang mengebrak. Bagian akhirnya menulis tentang Bareskrim yang tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp 6,762 Trilyun itu. Dasar pertimbangannya adalah karena *'Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang, sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden. Tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan,*

*walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 Trilyun ke Bank Century tidak terlalu sulit.'*

Kalimat ini bersayap. Pansus geger dan menggegerkannya lebih luas. Anggota Pansus Hak Angket Century Andi Rahmat menilai, maksud dari kalimat itu pada 'intinya Bareskrim sudah menyelidiki internal, tapi karena dikhawatirkan ada akses ke calon wapres yang akan dilantik, kemudian dihentikan'. Bahkan anggota Pansus ini menyebut, Susno tidak bisa melanjutkan karena ada perintah penghentian.

Di Mabes Polri, Kabareskrim menepis dan mengatakan isi testimoni yang berisi kasus Century. "*Ngaco itu,*" kata Komjen Pol Ito Sumardi. Menurutnya, Mabes Polri tidak pernah menerima testimoni itu. "*Ada nggak testimoni tertulis Pak Susno? Ya, diserahkan ke Pansus tapi Pansus tidak menyerahkan ke kita. Akan kita klarifikasi,*" ujarnya sambil menyatakan Mabes Polri akan memanggil Susno.

Susno menampik hal ini. Menurutnya, Ito Sumardi lupa pada pengalaman pahit ketika tidak bisa mewujudkan panggilan terhadap dirinya. "*Justru yang ngaco itu adalah Ito sendiri,*" kecam Susno. "*Coba pikir. Pertama, apa dasar pertimbangan Pansus untuk menyerahkan data itu ke Ito? Kedua, mengapa Ito mempersoalkan kebijakan saya? Ya atau tidak, yang tahu itu saya, bukan Ito!*"

Susno juga membantah menulis testimoni. “Saya tidak pernah menyerahkan testimoni tertulis ke Pansus,” jawab Susno pada 26 Januari 2010 lewat SMS saat dia melakukan perjalanan umroh. “Yang saya serahkan tertulis itu adalah data pendukung bukan testimoni.” Dia menjelaskan, hal yang disampaikannya secara resmi adalah yang di depan Pansus dan didengar langsung oleh pemirsa TV. “Saya kira tanpa dijelaskan semua orang tahu.”

Susno sendiri tegas-tegas membantah membuat testimoni. Menurutnya yang disebut testimoni itu hanyalah kerangka buku yang diajukan kepadanya. “Itu kerangka tulisan yang diajukan pada saya untuk dijadikan buku tentang figur saya,” tulis Susno masih lewat SMS. Menurut Susno, kerangka buku berjudul ‘Bhayangkara Sejati, Setia dan Loyal’ itu belum disetujui dan belum ditandatanganinya. Ketika Pansus meminta catatan aliran dana, konsep buku ada dalam bagian catatan. Dia tidak mungkin menyobeknya. Adapun dokumen yang dia serahkan itu adalah dokumen skema aliran dana Robert Tantular dan kroni-kroninya, serta dokumen data dana yang dibekukan di dalam dan di luar negeri.

Meskipun Susno terkesan membantah, Andi Rahmat tetap yakin Susno telah membuat testimoni. Anggota Pansus dari Partai Keadilan Sejahtera ini yakin Susno tidak mungkin memberikan testimoni tanpa pertimbangan dan menyarankan agar mengecek akurasi testimoni itu. Untuk hal ini, Susno berkomentar. “Pak Andi itu lupa pada sinyal

saya yang menyebutkan bahwa fakta pendukung lebih *valid* ketimbang testimoni.”

Sementara itu, Neta S. Pane dari *Indonesian Police Watch* (IPW) mengatakan, jika memang benar, ini sesuatu yang menarik. “Harus ditelusuri siapa yang mengintervensi Susno dalam proses penyelidikan Bank Century,” ujarnya. Permintaan penghentian pengusutan merupakan bentuk intervensi terhadap kerja polisi dalam mengungkap suatu kasus yang merugikan keuangan negara, sekaligus menguatkan dugaan adanya politisasi. Namun Neta meminta agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa data tertulis itu sebuah testimoni. “Sebaiknya publik menunggu Susno mengklarifikasi,” kata Neta.

Klarifikasi itulah yang dilakukan Mabes Polri, walau belum mendapatkan berkas yang disebut testimoni itu. “Salah seorang pejabat tinggi Mabes telah meminta klarifikasi kepada Beliau,” ujar Kabareskrim Ito Sumardi. Menurutnya, Susno menjawab bahwa yang tersebar di Pansus bukanlah testimoni. Hasilnya pun sudah dilaporkan ke pucuk pimpinan Polri. “Dan Kapolri menyatakan tidak ada masalah,” sambung Ito. Mabes Polri belum menindak Susno karena data dalam konteks testimoni itu belum mereka terima. Mabes pun tidak akan memanggil Susno. “Mungkin *nggak* (dipanggil). Setelah beliau kembali dari umroh dia kan lapor kepada pimpinan untuk menjelaskan,” ungkap Ito.

Melihat adanya data yang disebut sebagai testimoni itu, pemerhati kepolisian Adrianus Meliala menilai Susno tidak lagi berada di *main stream* Polri. “Dia sekarang tidak di bawah kendali Polri,” kata Adrianus yang yakin Susno masih punya amunisi untuk kembali mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. “Setelah sidang Antasari dan Pansus, dipercaya akan ada peluru-peluru lagi. Karena itu Polri harus berhitung,” ujarnya.

Jika ditilik dari pemunculan Susno di sidang Antasari yang tidak diproses Propam, sebenarnya sudah terlihat bahwa Polri menginginkan rekonsiliasi. Namun kemudian muncul lagi apa yang disebut testimoni. “Kalau dilihat ini serangan balik. Sekarang apakah Polri mau menerima atau tidak,” imbuhnya. Dia yakin Polri pun sudah mempunyai sejumlah rencana, apakah mau diselesaikan secara kekeluargaan atau dibawa ke Propam.

Sementara itu, beberapa anggota Pansus menganggap testimoni Susno sangat krusial untuk diklarifikasi. Untuk itu, Pansus diminta untuk memanggil Kapolri dan Susno secara bersamaan supaya dapat menjelaskan masalah ini. “Perlu diklarifikasi apa benar seperti itu. Kita undang Susno, kita undang Kapolri kalau mau terang benderang,” ujar Maruarar Sirait dari FPDIP. Menurut Ara, Pansus dapat merunut fakta di balik testimoni itu. Sejumlah lembaga juga diminta dihadirkan untuk memperjelas masalah ini. “Kita undang Manajemen Bank Century, Manajemen Bank Mutiara, LPS, bersama

kepolisian dan BI.” Ara berharap Pansus tidak menyepelekan testimoni Susno.

Adapun anggota Pansus Century Ade Komarudin menilai testimoni itu sebagai dokumen sah. “Semua yang didapat Pansus itu sah. Itu bagian dari proses,” ujarnya. “Dan tidak ada yang luar biasa. Walaupun ini menyangkut RI 2, itu tidak mengagetkan.” Begitupun, Pansus tidak akan memanggil Susno kembali. “Susno tidak perlu dipanggil. Kita ada penjelasan lisan dari Susno dan kita ada dokumen tertulis,” kata Ade.

Dalam menyikapi hal ini, Mabes Polri akan menanggapi apabila Polri diminta oleh Pansus. “Nanti kita akan sampaikan fakta-fakta yang kita miliki sehingga semuanya menjadi jelas,” kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi pada Senin 1 Februari 2010, sembari berharap agar masalah testimoni ini tidak menjadi bias karena dia yakin Susno tidak bermaksud seperti apa yang tertera di testimoni.

Namun dalam prosesnya, Mabes Polri sudah berbalik arah. Mereka tidak lagi akan meminta keterangan dari Susno. “*Nggak* ada pemeriksaan internal. Pak Susno juga baru pulang umroh,” kata Ito yang yakin testimoni itu lebih tepat disebut sebagai kerangka buku yang belum diedit. “Mungkin dalam membuat itu penulis membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan yang Pak Susno sampaikan.”

Atas perkembangan yang menghangat itu, komentar-komen-

tar pun bermunculan. Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Farouk Muhammad mengharapkan agar Polri dan Susno tidak lagi berpolemik. Lebih baik kedua belah pihak mengkonfrontir data masing-masing. "Saya tidak bisa komentar banyak. Sebenarnya persoalan sekarang adalah mana di antara keduanya ini yang benar," katanya.

Mantan Kapolri Jenderal Sutanto yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga buka suara. Dia yakin walau muncul testimoni yang menghebohkan, Polri tidak akan pecah. "Jangan mengada-ada," kata Sutanto.

Sementara itu, Susno terlihat santai-santai saja. "Saya kira tidak ada yang perlu diklarifikasi, karena saya tidak pernah membuat testimoni," kata Susno melalui SMS kepada detik.com, Selasa 2 Februari 2010. Susno mengatakan, pertemuannya dengan Kapolri hanya rutinitas biasa sebagai bawahan. "Yang namanya anak buah selesai melaksanakan izin, kewajibannya lapor," jelasnya.

Susno juga menjelaskan bahwa dokumen yang selama ini dianggap testimoni bukanlah buatan dirinya melainkan *draft* bukunya yang masih dalam proses. "Saya tidak pernah membuat testimoni. Semua kesaksian saya berikan di hadapan Pansus di bawah sumpah sesuai apa yang ditanyakan. Sedangkan yang saya berikan adalah data pendukung, bukan testimoni," tegasnya.

Lantas mengenai data yang diserahkan saat memberi kete-



rangan di Pansus, Susno menjelaskan, “Kan *nggak* ditanya. Saya *nggak* mungkin bercerita kalau *nggak* ditanya. Apa yang ditanya itu yang saya jawab,” jelas Susno.

Namun demikian, Susno tidak membantah materi keterangan tertulis yang selama ini dikenal publik sebagai ‘testimoni’. Soal kebenarannya, Susno menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat. “Tulisan itu data pendukung atau informasi, boleh dipakai dan boleh tidak. Benar atau tidak isinya jangan saya yang menilai melainkan masyarakat dan Pansus,” kata Susno.

Susno keberatan jika data itu disebut sebagai testimoni. “Saya tidak membantah sedikit pun materinya, yang saya bantah namanya. Saya kurang *sreg* kalau namanya testimoni,” tutur Susno. Dia juga mengaku siap untuk menjelaskan kembali kepada Pansus apabila diperlukan. “Mana pernah yang namanya Susno tidak siap,” tukas Susno.

Mengenai materinya, Susno membantah adanya intervensi saat penyelidikan kasus *bailout* Bank Century yang mengarah pada Boediono. Menurutnya pada saat itu dia sudah tidak lagi di Bareskrim. “Kalau masih Kabareskrim, saya punya kewenangan untuk mendahulukan yang mana disidik dan mana yang tidak.”

Menurut Susno, saat dia masih Kabareskrim, penyidik kasus Century terbagi menjadi tiga, yaitu pertama tentang kasus Antaboga, kedua tentang Bank Century, dan yang ketiga

tentang *bailout*. “Antaboga itu diprioritaskan karena milik nasabah. Yang kedua juga ada duit nasabah dan kita prioritaskan. Tentang *bailout* bukan tidak diprioritaskan. Karena itu tidak masuk duit orang per orang,” jelasnya.

Susno menjelaskan, saat Bareskrim akan memintai keterangan beberapa pihak ternyata ada pihak-pihak yang sedang mengikuti kegiatan pemilihan presiden. Dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak itu tidak sempat dilakukan karena dirinya tidak lagi menjabat sebagai Kabareskrim. “Tahu-tahu, begitu sudah tahap mau diperiksa, saya sudah *nggak* jadi Kabareskrim lagi. Sekarang diganti Pak Ito. Apakah Pak Ito memprioritaskan atau tidak?” tanyanya penuh arti.





#25

## Harga Diri Saya Diinjak-Injak!

Kesan saya, ada antusiasme untukewartakan pencopotan saya pada dunia,” syak Susno. “Saya jadi *famous* atau *notorious*, entahlah.” Dia merasa institusi Polri tidak melindungi dan membela dirinya. Padahal, banyak orang di Mabes Polri yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. “*I’m a lone ranger*,” tukasnya.

Pada saat-saat berada di titik nadir, Susno yang sudah lama

tidak punya waktu bersama keluarga, mendadak mendapat dukungan dari keluarga besarnya dari Pagar Alam dan Sumatera Selatan. "Seluruh sanak keluarga dan famili merasa sedih, sekaligus marah," kata Susno. "Seluruh kami tidak punya apa-apa dan bukan berasal dari orang berkedudukan, tapi kami punya marwah dan kehormatan. Harga diri saya telah diinjak-injak. Kami tidak bisa menerima perlakuan yang merendahkan!"

"Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya dicopot karena alasan yang tidak jelas. Tapi saya diam. Saya terima itu semuanya karena saya percaya atas ucapan Kapolri pada saat sertijab yang mengatakan bahwa ini mutasi," lanjut Susno. "Ucapan ini saya artikan bahwa saya menunggu sebentar untuk mendapat penugasan baru. Tapi ternyata mutasi terjadi, beberapa posisi untuk pangkat Komjen sudah mulai diisi. Tampaknya saya sudah tidak akan dapat *kavling* lagi."

Kalau menyampaikan kebenaran masih dianggap salah, dan institusi justru mengambil sikap berseberangan, Susno yang disudutkan akhirnya akan mengambil sikap. Dia akan bangkit menjelaskan. Cukuplah sikap diam itu. Sekarang layar telah terkembang, surut kita berpantang. Bola telah bergulir, permainan sudah berjalan. "Dan saya akan bermain secara profesional," tegasnya.

Seorang kawan pernah bertanya kepada Susno, apakah akan ada islah? Susno terhenyak dengan pertanyaan itu. Islah?

Islah dengan siapa? "Saya tidak mau dan tidak ada secuil pun niat saya untuk berbenturan dengan institusi kepolisian yang telah membesarkan saya," jawab Susno yang merasa bahwa dirinya sudah dirugikan dan dilalimi.

"Jadi saya sudah pada posisi yang tidak punya *bargaining power* lagi. Saya sudah tersudut, dinding tebal ada di punggung saya. Saya tidak bisa mundur lagi!" kata Susno. "Jadi islah apalagi yang bisa dilakukan?" Menurut Susno, dia hanya mau rehabilitasi nama. Dia ingin agar institusi Polri tampil membela dan memulihkan nama baiknya. Puluhan tahun menjalani karir dan berbakti tanpa cacat, dia tidak rela harus berakhir begini. Itulah yang membebani pikirannya.

Sementara itu, ada juga kawan lain yang bertanya kemungkinan jika Susno diangkat jadi Duta Besar (Dubes) di Malaysia. "Kalau itu benar ditawarkan, maka jawaban saya adalah: Tidak!" tukasnya. Susno menjabarkan, penolakannya itu berdasar pada tiga hal. Pertama, karena dia merasa tidak cocok jadi diplomat.

Kedua, Kuala Lumpur yang selama ini seolah-olah menjadi jatah Polisi, diberikan kepada bintang empat. Susno tahu diri, dia cuma bintang tiga. "Dan yang ketiga sangat prinsip sekali," jelas Susno. "Kalau tawaran jadi Dubes itu saya terima, berarti saya dibuang. Dan itu berarti saya mengakui secara tidak langsung bahwa saya memang telah berbuat salah. Padahal saya tidak salah apa-apa!"

Lalu apa yang bisa mengobati kalbu Susno? *"I wish I were back to position!"* katanya. "Kembalikan saya ke posisi yang pas. Satu minggu pun boleh, untuk kemudian silahkan dicopot lagi!" Menurutinya, ini untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya tidak pernah berbuat salah!

Namun hari dan peristiwa terus bergulir. Ketika Senin, 8 Februari 2010 lalu Presiden hadir memberi sambutan pada Rapat Pimpinan Polri di aula gedung PTIK, publik mencaricari wajah Susno lewat layar kaca. Tapi tak ada. Dan ini jadi pertanyaan, spekulasi pun bergentayangan. Ke mana Susno? Bukankah dia masih menjabat sebagai Perwira Tinggi Mabes Polri dan masih menyandang pangkat Komisaris Jenderal? Diundang, atau tidak diabaikankah dia? Mantan Kapolri Rusdiharjo yang sudah divonis bersalah dan sedang menjalani proses bebas bersyarat saja hadir di Rapim itu, mengapa Susno tidak?

Ketika hal ini ditanyakan ke Susno, dia cuma menjawab ringan. *"Nggak diundang ya nggak apa-apa. Saya memang tidak diundang. Tapi saya santai-santai saja kok! Terserah mereka saja."* Menurut Susno, jika dia diundang, kehadirannya pasti menimbulkan kerisihan dan suasana yang kikuk. Pihak pengundang pasti tidak menginginkan suasana yang tidak kondusif seperti itu.

Tapi bukankah dengan ketidakhadirannya juga publik akan bertanya-tanya?



## Pascawacana: **Cerita Belum Usai**

*K*etika selesai membaca dan akan segera menutup buku ini, pastilah rasa penasaran masih menggrogoti pikiran kita. Kisah ini belum selesai. Perseteruan, tug of war, ulur-tarik, persaingan, penentangan, intrik dan lain-lain, whatever-lah, semua masih akan terus berjalan. Kita harus menunggu titik omega itu.

*Tetapi kita juga harus mengakhiri buku ini, meski kisah ini*



*belum tuntas, bak hikayat 1001 malam yang tak sudah. Kita harus berberes di sebuah garis, selagi pikiran curiga dan keingintahuan terus menggedor pintu hati. Apa boleh buatlah. Suasana memang sudah begitu bablas di era reformasi ini. One always has the air of someone who is lying when one speaks to a policeman, kata novelis Charles-Louis Phillipe.*

*Saya kira begitu.*

*Lantas, setelah menelusuri baris-baris kalimat di buku ini, apa yang menggeliat di pikiran kita? Dapatkah Susno dipercaya, dan benarkah penuturannya? Apakah wajahnya sudah mulai bersih dengan lingkaran kekeramatan di atas kepala, ataukah wajahnya masih kayak setan? Malaikakah, atau ibliskah Susno?*

*Halah.....! Biarlah itu menjadi petualangan kita berikutnya. Perjalanan ini memang jadi semacam endless journey of justification, pencarian kebenaran yang nisbi. Ini adalah kerja kita berikutnya, menyusuri jalan panjang untuk menemukan batin yang bersih dan nurani yang tulus. Sebuah upaya yang melelahkan tanpa ada kepastian bisa menemukannya. Tapi kita tetap akan berjalan pelan, selangkah-selangkah, bersama-sama.*

Once a journey is designed, equipped, and put in process a new factor enters and takes over...it has personality, temperament, individuality, uniqueness. A journey is a

person in itself....., kata novelis John Steinbeck. Susno pun hanya ingin menjadi manusia saja. Sesuai kehendak Yang Maha Agung. Dia hanya ingin bekerja normal kembali di tengah kecentangperenangan institusinya. Dia ingin istrinya bisa bersosialisasi lagi, anaknya bisa masuk kerja lagi dan nyawa cucunya tidak terancam lagi. Mereka sekeluarga ingin bisa berdiri tegak lagi, menghadapkan wajah ke matahari, tersenyum manis jika berpapasan dengan orang lain. Mereka ingin hidup biasa, persis seperti kita semua.

Tapi semua harus dilalui. Setelah harga dirinya diinjak-injak, Susno pun menyikapi penggalan kalimat yang ditulis Neil Sedaka. Apakah arti seorang laki-laki sejati? Apakah yang diperolehnya? Kalau seorang laki-laki tidak memiliki dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki apa-apa. Seorang laki-laki harus berani mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakannya, dan bukan mengatakan kalimat-kalimat orang-orang yang bertekuk lutut. Data-data sudah menunjukkan, dan saya akan buka semuanya!

"Saya memutuskan untuk bangkit dan menjelaskan kepada publik! Yang besar dan banyak belum tentu benar, yang kecil dan sedikit belum tentu salah. Yes! The opinion of million people is not necessarily true, the opinion of one person is not necessarily wrong. Berjuta kepalsuan dan hipokrisi akan pupus bila satu kebenaran datang membantah." tutup Susno di akhir perbincangan.

*Buku ini toh masih bisa dilanjutkan lagi suatu masa kelak, dengan follow-up yang punya nilai kemutlakan. Dan saya akan ada di sana, untuk kalian.*

Thanks for sharing, thanks for caring!

*Papringan, Yogya, 10 Februari 2010*



## Tentang Penulis



**IZHARRY AGUSJAYA MOENZIR** lahir di Medan, 31 Agustus 1951. Memulai karir kewartawanan sebagai penyiar radio (1970) dan wartawan cetak di Harian Waspada, Medan (1973). Di Jakarta, dia menjadi *Program Director* di Radio Prambors Rasisonia (1981), untuk kemudian mendalami jurnalistik di Pilipina (1990) dan di Amerika Serikat (1991). Kembali ke Indonesia, Izharry menjadi penyiar di Radio Delta FM (1998) dan Pemimpin Redaksi di Radio Trijaya Network (1999). Selain menjadi Wakil Pemimpin Umum di Harian Riau

Mandiri, Pekanbaru dan Harian Sijori Mandiri, Batam (2004), dia juga aktif sebagai *anchorman* talkshow SudutBidik di QTV & TVSwara. Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Medan (1994) ini, juga menjadi Pengurus Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Sumatera Utara (1997) dan Ketua *Press Foundation of Indonesia* (2000). Sebagai jurnalis media cetak dan media elektronik, IzHarry aktif menulis kolom di beberapa penerbitan. Ayah tiga anak ini juga menulis beberapa buku, yaitu biografi Guru Besar Ekonomi Prof. DR. H. S. Hadibroto (1997), biografi Bendahara Yayasan Dharmais Brigjen TNI Hedijanto (1997), biografi Pejuang Kemerdekaan Mayor Tengku Nurdin (1998), biografi pencipta lagu Bengawan Solo, Gesang (1998), biografi seniman Rinto Harahap (1999), dan menjadi editor untuk dua buku Menteri Kehakiman RI Ismail Saleh, SH (2001). Kini, selain memberi pelatihan jurnalistik, Izharrry juga duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Contact: [izharryagusjaya@yahoo.com](mailto:izharryagusjaya@yahoo.com)





***“The opinion of million people is not necessarily true,  
the opinion of one person is not necessarily wrong.”***

**■ Susno Duadji ■**

*Siapa Susno Duadji sebenarnya? Ia pribadi unik dan pemberani. Namun gaya Palembang-nya yang hangat dan mudah meledak, pernah membuat institusi Polri kelabakan karena ia mempertentangkan dengan KPK, sebagai ‘buaya’ lawan ‘cecak’. Sayang, Susno kemudian dicampakkan begitu saja oleh Polri tanpa diadili secara layak. Susno harus bicara! Tanpa itu, akan berlaku pepatah “setengah kebenaran lebih jahat dari kejahatan itu sendiri”.*

**■ Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ahli Hukum Tata Negara**

*Posisi Susno Duadji di tengah pusaran Century Gate sangat menentukan. Dia memegang kunci untuk membuka kotak pandora yang selama ini penuh misteri. Buku ini menarik untuk dibaca karena berisi ‘testimoni’ mantan Kabaeskrim, yang dapat memandu kita memahami apa yang terjadi di balik kasus yang mengguncangkan Republik ini.*

**■ Andy F. Noya, Host Kick Andy**

*Komjen Pol Susno Duadji bagaimanapun memang menjadi tokoh penting dan kontroversial 2009, dengan citra yang terpojok. Puncaknya, jabatan selaku Kabaeskrim Polri dicopot. Namun berkat keberanian mengungkap hal-hal seputar dirinya terkait skandal Bank Century dan kasus Antasari Azhar, akhirnya pandangan publik berubah. Dia mendapat pujian dari masyarakat luas, justru pamor Polri yang kian terpuruk. Jika Susno tetap konsisten dan lebih berani mengungkapkan yang masih tersembunyi dan yang semestinya diketahui publik demi tegaknya hukum, maka citra positifnya akan bersinar selamanya.*

**■ Tarman Azzam, Ketua Dewan Kehormatan PWI**

*Dari sudut pandang komunikasi, to get a message accross memegang posisi sentral. Buku Susno ini mencuat ke publik setelah terpaan kasus Bank Century, Kriminalisasi KPK dan sinisme terhadap institusi penegak hukum. Buku ini mengandung pesan buat kita semua: Perlu komitmen kuat dan kerja keras untuk berbenah menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini.*

**■ Indrawadi Tamin, Ph.D**

**Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonusa Esa Unggul**

*Sosok Susno Duadji bisa dijelaskan melalui pepatah ‘tak kenal maka tak sayang’. Susno salah satu tokoh kunci yang mengetahui cerita di belakang layar drama kriminalisasi KPK sampai skandal Century. Masyarakat ingin Susno, penyandang gelar from zero to hero, mengukir tabir misteri itu. Semoga buku ini menjadi langkah awal bagi Susno untuk mengungkap kebenaran.*

**■ Budiarto Shambazy**

**Wartawan Senior**

*Susno Duadji menjadi sebuah fenomena di Polri. Saat menjadi Kapolda Jabar, Susno membabat habis aksi premanisme yang di-backing oknum aparat di Jalur Pantura. Saat menjadi Kabaeskrim, Susno diterjang Kasus Cacak-Buaya yang membuat citranya terpuruk hingga ke titik nol. Namun sikapnya yang sederhana, blak-blakan dan transparan dalam memaparkan kasus-kasus yang dituduhkan kepadanya, membuat Susno mendapat simpati publik. Tentunya publik membutuhkan figur-figur seperti Susno agar reformasi Polri dapat bergulir cepat.*

**■ Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch**

*Ketika kami di Elshinta mewawancarai Susno tentang kesaksiannya di Pansus Century, banyak pendengar yang berinteraksi merasa menyesal dan menangis karena merasa bersalah telah berprasangka buruk terhadap Pak Susno. Hal-hal beginilah yang selalu menyentuh hati saya sebagai penyiar.*

**■ Margianto, Jurnalis Radio Elshinta**

**Penerbit**

**PT Gramedia Pustaka Utama**

Kompas Gramedia Building

Blok I, Lantai 4-5

Jl. Palmerah Barat 29-37

Jakarta 10270

www.gramedia.com

**Sosial - Politik**

ISBN: 978-979-22-5509-6



9 789792 225509  
GM 20701100006